

CITRA SULAWESI TENGGARA DALAM ARSIP



U



Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : KABUPATEN TIWORO
Kecamatan : Kecamatan
Desa/kelurahan : Desa/kelurahan
Kode Pos : 91211
Angka Samudra : 0



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, November 2007

LEGENDA:

	Kota/Kabupaten		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan
	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan
	Kabupaten		Kabupaten		Kabupaten

STRUKTUR ADMINISTRASI:

Provinsi : Sulawesi Tenggara
Kabupaten : Kabupaten Tiworo
Kecamatan : Kecamatan
Desa/kelurahan : Desa/kelurahan

INFORMASI LAINNYA:

1:1.000.000
1:100.000
1:50.000
1:25.000
1:10.000
1:5.000
1:2.500
1:1.000
1:500
1:250
1:100
1:50
1:25
1:10
1:5
1:2
1:1

PROJEKSI: UTM
ZONA: 48S
MERIDIAN: 120E
DATUM: WGS 84
ELEVASI: 1000
KONTUR: 100
KONTUR: 200
KONTUR: 300
KONTUR: 400
KONTUR: 500
KONTUR: 600
KONTUR: 700
KONTUR: 800
KONTUR: 900
KONTUR: 1000
KONTUR: 1100
KONTUR: 1200
KONTUR: 1300
KONTUR: 1400
KONTUR: 1500
KONTUR: 1600
KONTUR: 1700
KONTUR: 1800
KONTUR: 1900
KONTUR: 2000
KONTUR: 2100
KONTUR: 2200
KONTUR: 2300
KONTUR: 2400
KONTUR: 2500
KONTUR: 2600
KONTUR: 2700
KONTUR: 2800
KONTUR: 2900
KONTUR: 3000
KONTUR: 3100
KONTUR: 3200
KONTUR: 3300
KONTUR: 3400
KONTUR: 3500
KONTUR: 3600
KONTUR: 3700
KONTUR: 3800
KONTUR: 3900
KONTUR: 4000
KONTUR: 4100
KONTUR: 4200
KONTUR: 4300
KONTUR: 4400
KONTUR: 4500
KONTUR: 4600
KONTUR: 4700
KONTUR: 4800
KONTUR: 4900
KONTUR: 5000
KONTUR: 5100
KONTUR: 5200
KONTUR: 5300
KONTUR: 5400
KONTUR: 5500
KONTUR: 5600
KONTUR: 5700
KONTUR: 5800
KONTUR: 5900
KONTUR: 6000
KONTUR: 6100
KONTUR: 6200
KONTUR: 6300
KONTUR: 6400
KONTUR: 6500
KONTUR: 6600
KONTUR: 6700
KONTUR: 6800
KONTUR: 6900
KONTUR: 7000
KONTUR: 7100
KONTUR: 7200
KONTUR: 7300
KONTUR: 7400
KONTUR: 7500
KONTUR: 7600
KONTUR: 7700
KONTUR: 7800
KONTUR: 7900
KONTUR: 8000
KONTUR: 8100
KONTUR: 8200
KONTUR: 8300
KONTUR: 8400
KONTUR: 8500
KONTUR: 8600
KONTUR: 8700
KONTUR: 8800
KONTUR: 8900
KONTUR: 9000
KONTUR: 9100
KONTUR: 9200
KONTUR: 9300
KONTUR: 9400
KONTUR: 9500
KONTUR: 9600
KONTUR: 9700
KONTUR: 9800
KONTUR: 9900
KONTUR: 10000



CITRA SULAWESI TENGGARA DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, November 2007

Sambutan

Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Salah satu bagian khasanah arsip yang telah berada di Arsip Nasional Republik Indonesia, adalah berbagai rekaman peristiwa sejarah dan fenomena yang menggambarkan dinamika Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penting dalam sejarah panjang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sulawesi Tenggara walaupun secara resmi baru menjadi provinsi pada tahun 1964 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara) namun sejarah keberadaan dan peranannya melebihi seabad keberadaannya sebagai provinsi. Kesultanan Buton yang berada pada jalur perdagangan dengan pusat rempah-rempah di Ternate telah menjadi perhatian VOC ketika armada dagang Belanda ini berada di wilayah Nusantara. Bahkan dalam catatan sejarah kontrak perjanjian dengan Belanda sudah dimulai sejak tahun 1677.

Pada tahun 1950 ketika Pemerintahan Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pulau Sulawesi hanya memiliki satu provinsi yaitu Provinsi Sulawesi dengan ibukotanya berada di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.

[Type text]

Sulawesi Tenggara dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi, juga dibentuk dalam tradisi dan suasana kebatinan Indonesia sebagai bangsa pejuang. Munculnya pergerakan kepemudaan dan berdirinya pergerakan kebangsaan seperti *Serikat Dagang Islam (SDI)* dan *Muhammadiyah* yang berdiri tahun 1930 di Kendari, *Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)* di Kolaka Utara, *Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)* tahun 1938 dan organisasi *Penyadar* tahun 1939, mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. *Haji Hasan*, *La Ode Maniru* dan *La Ode Abdulu* dari Buton serta *Opu Todjabali* dari Kolaka adalah beberapa nama tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara yang bersama rakyat mengobarkan perlawanan melawan penjajahan.

Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara mempunyai peranan yang penting dan bersejarah dalam perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sulawesi Tenggara selain mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, juga memiliki latar budaya dan adat istiadat yang mengakar pada tradisi budaya yang begitu beragam. Dengan letak geografis yang memiliki alam yang menakjubkan menjadikan Sulawesi Tenggara merupakan salah satu aset bangsa Indonesia dan menjadi tujuan wisata budaya unggulan. Tradisi budaya Islam yang mengakar sejak berdirinya Kerajaan Konawa, Kesultanan Buton dan kerajaan-kerajaan lain pada abad ke-17 memberi corak sendiri dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan budaya unggulan di Sulawesi Tenggara.

Industri pertambangan dengan tradisi masyarakat penambang aspal alam di Buton merupakan aset penting lain yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengungkapan sejarah Sulawesi Tenggara dengan berdasarkan arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan menyadarkan kembali kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya terhadap nilai-nilai perjuangan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Inilah salah satu tujuan dari program **Citra Daerah** yang sekarang sedang dikembangkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjadikan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Data dan fakta yang terkandung dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
Terima Kasih.

Jakarta, November 2007

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Sambutan Kepala ANRI	iii
Daftar Isi	v
Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara	vi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Letak Geografis	2
C. Periode Kerajaan	3
D. Periode Kolonial	4
E. Periode Pergerakan Kebangsaan	7
F. Periode Pendudukan Jepang	8
G. Periode Kemerdekaan Republik Indonesia	9
H. Sulawesi Tenggara dalam Khasanah Arsip	11
Daftar Pustaka	13
CITRA SULAWESI TENGGARA DALAM ARSIP	14
Geografis	15
Politik dan Pemerintahan	22
Pertahanan dan Keamanan	51
Perekonomian	60
Pertambangan	77
Sosial	87
Kebudayaan dan Pariwisata	100
Keagamaan	115
DAFTAR ARSIP	120
PENUTUP	138



Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara
2003

ANRI: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

[Type text]

Pendahuluan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangunkan pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program Citra Daerah, yaitu penyerahan hasil alihmedia (berupa *hard copy* dan *soft copy*) dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu Provinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2007 ini adalah Provinsi Sulawesi Tenggara .

Arsip mengenai Sulawesi Tenggara yang diserahkan mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC)* sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara pada periode tersebut. **Citra Sulawesi Tenggara Dalam Arsip** ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Sulawesi Tenggara pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. LETAK GEOGRAFIS

Provinsi Sulawesi Tenggara berada di semenanjung tenggara dari Pulau Sulawesi terletak pada posisi 3° - 6° Lintang Selatan (LS) dan 120° 45' -124° 60' Bujur Timur (BT). Secara geografis provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di bagian utara, Laut Flores di bagian selatan, Teluk Bone di bagian Barat dan Laut Banda di bagian timur. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Kendari. Luas daratan provinsi ini adalah 38.140 km² dengan jumlah penduduk 1.881.512 (tahun 2003).

Secara administratif Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada awalnya Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 4 daerah Tingkat II Kabupaten dan 1 kotamadya, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Kendari, Kabupten Kolaka, Kabupaten Buton dan Kotamadya Kendari. Namun setelah mengalami pemekaran wilayah, Sulawesi Tenggara saat ini memiliki 10 Kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 104 kecamatan dan 1.529 kalurahan/desa. Sepuluh Kabupaten dan dua kota di Provinsi Sulawesi Tenggara itu, ialah:

1. Kabupaten Bombana;
2. Kabupaten Buton;
3. Kabupaten Buton Utara;
4. Kabupaten Kolaka;
5. Kabupaten Kolaka Utara;
6. Kabupaten Konawe;
7. Kabupaten Konawe Selatan;
8. Kabupaten Konawe Utara;
9. Kabupaten Muna;
10. Kabupaten Wakatobi
11. Kota Bau-Bau;
12. Kota Kendari.

C. SULAWESI TENGGARA DALAM LINTASAN SEJARAH PERIODE KERAJAAN

Berdasarkan benda-benda bersejarah yang ditemukan seperti: nekara, kompleks lesung batu, kompleks sarkofakus, periuk berhias, golok dan kapak secara nyata menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara telah dihuni oleh manusia sejak jaman pra sejarah. Manusia pra sejarah ini yang kemudian secara turun temurun menjadi penduduk asli wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya.

Ciri-ciri penduduk asli Sulawesi Tenggara mempunyai kemiripan dengan suku-suku bangsa asli di Indonesia lainnya. Suku bangsa terbesar di Sulawesi Tenggara adalah suku Tolaki. Dari suku bangsa ini kemudian lahir dua kelompok baru, yaitu suku bangsa Konawe dan suku bangsa Mekonggadan. Kemudian berkembang pula suku-suku bangsa yang lain seperti suku

Buton, suku Muna, suku Kalisoso, suku Moronene, suku Walio dan suku Wowonii.

Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam yang berlimpah, sehingga wilayah ini banyak didatangi masyarakat dari berbagai wilayah disekitarnya. Hal ini tentu saja semakin menambah beragamnya suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Sulawesi Tenggara. Suku-suku lain yang kemudian beradaptasi dengan penduduk asli antara datang dari selatan Pulau Sulawesi antara lain: suku Bugis, Selayar, Makasar, Suku Toraja dan lain sebagainya.

Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan pertama yang ada di Sulawesi Tenggara didirikan oleh suku setempat yaitu *Kerajaan Konawe* pada abad ke-10. Kerajaan tersebut didirikan oleh *Totongano Wonua*, keturunan *Mokole Pangguni* di Unaaha. Pemerintahan Kerajaan Konawe saat itu cukup modern karena telah mengenal Perdana Menteri, pejabat daerah dan para pengendali keamanan.

Karena wilayahnya yang cukup strategis dalam pelayaran, Sulawesi Tenggara berkembang cukup pesat, sehingga bermunculan kerajaan-kerajaan lain seperti *Kerajaan Muna*, *Kerajaan Kemongga*, *Kerajaan Tiworo*, *Kerajaan Moronene* dan *Kasultanan Buton*. Kerajaan-kerajaan tersebut saling menjalin hubungan satu sama lain melalui ikatan perkawinan, bahkan dalam silsilah raja-raja di Sulawesi Tenggara terungkap bahwa penguasa Kerajaan Konawe, Kerajaan Buton, Kerajaan Muna dan Kerajaan Kemongga mempunyai hubungan keluarga dengan para penguasa kerajaan Bone dan Luwu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Selain itu diakui pula bahwa raja pertama di Sulawesi Tenggara adalah keturunan dari keluarga *Sawerigading*.

D. PERIODE KOLONIAL

Sulawesi Tenggara merupakan pintu gerbang masuk ke wilayah Ternate yang merupakan pusat penghasil rempah-rempah di Nusantara. Kesultanan Buton yang berada di jalur lintasan perdagangan rempah-rempah itu kemudian menjadi ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Hal ini

menimbulkan perhatian bagi VOC (*Vereeniging Oost Indische Compagnie*) dan *Kerajaan Goa* untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah ini.

Pada tanggal 5 Januari 1613, VOC di bawah pimpinan Komodor *Afolonius Schot* mengunjungi Kesultanan Buton yang diterima oleh *Sultan Buton IV Danayu Ikhsanuddin* (1597 – 1631). Tujuan VOC pada awalnya adalah berdagang sebagaimana dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, seperti Spanyol dan Portugis. Namun, lama kelamaan ternyata terlihat bahwa VOC mempunyai niat untuk menguasai Buton. Hal tersebut segera menyadarkan Sultan Buton dan bersama rakyatnya berusaha memperkuat benteng pertahanan untuk menghadapi VOC. VOC akhirnya segera meninggalkan Buton tahun 1616. Namun beberapa lama kemudian, VOC datang kembali dengan kekuatan bersenjata dan memaksakan monopoli perdagangan dengan kekerasan dan politik adu domba di wilayah ini.

Politik licik VOC terlihat ketika Kesultanan Buton diadu domba dengan Kerajaan Muna. Hal ini membuat rakyat Buton melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada tahun 1664, rakyat Muna juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan rakyat Muna dan rakyat Buton ini tidak seimbang dengan kekuatan bersenjata VOC sehingga perlawanan itu dapat dipadamkan pada tahun 1668.

Perlawanan rakyat Buton kembali lagi terjadi pada tahun 1755, setelah sebelumnya terjadi ketegangan antara VOC dengan Kesultanan Buton. Dalam peperangan ini rakyat Buton berhasil mengusir Belanda hingga mereka mengundurkan diri ke Makasar. Namun dengan tipu muslihat dan politik liciknya, akhirnya Belanda berhasil menguasai Buton, melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Buton pada tahun 1887 yang berisi antara lain bahwa Kesultanan Buton adalah bagian dari wilayah kekuasaan Belanda. Perjanjian ini diperbaharui tahun 1906. Perjanjian-perjanjian ini sangat menekan rakyat sehingga beberapa kali rakyat Buton kembali angkat senjata melawan Belanda.

Sementara itu, Kerajaan Konawe mengalami kemunduran semenjak *Raja Lakidende* wafat. Kemunduran ini diawali

dengan munculnya seorang anggota dewan dari daerah **Ranome Eto** bernama **Tebau**, yang mengangkat diri menjadi raja. Namun karena para anggota Dewan tidak setuju akhirnya Tebau mengundurkan diri. Setelah raja Tebau wafat (1858), putranya yang bernama **La Mangu** mengadakan perjanjian rahasia dengan **A.A.Vries** yang mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Perjanjian ini menyangkut pembentukan **Kerajaan Laiwoi** yang melepaskan diri dari Kerajaan Konawe yang wilayahnya meliputi Ranoma Eto. Pembentukan kerajaan ini tidak dapat terwujud sebelum Kerajaan Konawe takluk. Upaya menaklukkan Kerajaan Konawe dilakukan melalui pendekatan dengan bangsawan Konawe, akhirnya pada tahun 1909 diadakan **Perundingan Malowe**. Melalui tipu muslihat licik dan adu domba, akhirnya Belanda dapat menaklukkan Konawe dan berhasil menawan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Konawe yaitu **Watukila**. Pada tahun 1917 Belanda berhasil menerapkan perjanjian **Lange Verklaring** dengan bangsawan–bangsawan Konawe. Sejak saat itu Kerajaan Konawe berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda.

Selain Kesultanan Buton dan Kerajaan Konawe, perlawanan rakyat juga terjadi di Kolaka tahun 1907 yang dipimpin oleh **Haji Hasan**. Perlawanan rakyat terhadap Belanda yang tidak seimbang ini pun dapat dipadamkan dengan tertangkapnya Haji Hasan pada tanggal 14 April 1914 oleh Belanda di sebuah kampung bernama **Salubongko**. Namun, walaupun Haji Hasan telah ditangkap, rakyat Kolaka terus melanjutkan perjuangan melawan Belanda dipimpin oleh **Opu Todjabali**.

Perlawanan rakyat Sulawesi Tenggara terhadap Belanda juga terjadi di Muna pada tahun 1914 – 1915. Perlawanan rakyat ini tidak lama karena tidak seimbangny kekuatan bersenjata rakyat dengan Belanda.

Setelah Pemerintahan Belanda dapat memadamkan perlawanan-perlawanan rakyat di wilayah Sulawesi Tenggara, Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengangkat **Sao-Sao** sebagai pimpinan Pemerintahan. Para kepala wilayah Kerajaan

diangkat dan diberi jabatan sebagai *District Hoofd* oleh Belanda dan mendapatkan imbalan gaji dari pemerintah Hindia Belanda.

Pada awal abad ke-20 pemerintahan Hindia Belanda membagi Sulawesi Tenggara menjadi 4 bagian atau distrik, yaitu: *Ranemo Eto*, *Konawe*, *Lasolo* dan *Andoolo*, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala distrik. Tiap-tiap kepala distrik membawahi beberapa *Onderdistrict* yang seluruhnya berjumlah 19 *Onderdistrict* dan saat itu telah ditetapkan bahwa ibukota Sulawesi Tenggara berada di Kendari.

Pada tahun 1938 berdasarkan *Zelfbestuurs Regeeling (ordonantie 1938)*, Kesultanan Buton dan bekas Kerajaan Konawe yang sekarang telah berubah nama menjadi Kerajaan Laiwoi ditetapkan sebagai *Zelfbesturende Landschappen* di dalam lingkungan Karesidenan Sulawesi Tenggara dan daerah taklukannya.

Pada tahun 1940 berdasarkan ketetapan *Gouvernement van Groot Oost (Pemerintahan Timur Besar)* Nomor 21 tanggal 23 Februari 1940, *afdeeling* Buton dan Laiwoi terdiri dari 3 *onderafdeeling* yaitu Buton, Muna dan Kendari.

Tata pemerintahan kolonial ini bertahan sampai pada saat Belanda akhirnya menyerah pada Jepang tahun 1942.

E. PERIODE PERGERAKAN KEBANGSAAN

Perkembangan organisasi politik di Sulawesi Tenggara secara tidak langsung tidak dapat terpisahkan dengan perkembangan organisasi politik di Pulau Jawa. Organisasi politik pertama yang muncul di Sulawesi Tenggara adalah *Serikat Dagang Islam (SDI)* yang berdiri tahun 1930 di Kendari. Pada tahun yang sama berdiri pula *Muhammadiyah* yang membuka cabang di Kendari. Muhammadiyah juga membuka cabang di Muna pada tahun 1932. *La Kare* adalah tokoh Muhammadiyah di Muna. Selain itu La Kare juga sebagai pendiri Sekolah Muhammadiyah I di Raha. Sekolah tersebut akhirnya ditutup oleh Belanda yang ketakutan bangsa Indonesia semakin kuat. La Kare kemudian ditangkap dan diasingkan ke Selayar 1934-1936 selanjutnya dipindahkan ke Bulukumba hingga tahun 1940.

Sementara itu, pergerakan kebangsaan di Kolaka dimulai dengan berdirinya Muhamadiyah di Kolaka tahun 1934. Setelah itu, kemudian muncul organisasi-organisasi lain pada tahun 1937 yaitu *Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)* di Kolaka Utara, *Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)* tahun 1938 dan organisasi *Penyadar* tahun 1939.

Dengan muncul dan aktifnya organisasi-organisasi ini di lingkungan masyarakat Sulawesi Tenggara setidaknya telah memberikan andil besar dalam menanamkan kesadaran akan kebangsaan pada rakyat Sulawesi Tenggara. Kesadaran berbangsa ini diwujudkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara antara lain dengan mewujudkan perlawanan terhadap Belanda.

F. PERIODE PENDUDUKAN JEPANG

Kekalahan Belanda dalam peperangan di Asia Pasifik terutama di wilayah Indonesia oleh tentara Jepang pada tahun 1942 disambut hangat oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Berakhirlah penjajahan Belanda atas Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara. Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Jepang menjajikan akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Namun ternyata janji-janji tersebut hanyalah retorika belaka. Kehidupan rakyat ternyata bukan semakin baik, namun bertambah sengsara. Dibentuknya *Giyugun* maupun Peta (Pembela Tanah Air) semata-mata hanyalah untuk membantu Jepang dalam perang untuk menguasai Asia Timur Raya.

Pendudukan Jepang di Sulawesi Tenggara akhirnya mendapat perlawanan dari rakyat. Pada akhir tahun 1943 penduduk Wanci, Buton di bawah pimpinan *La Ode Maniru* dan *La Ode Abdulu* menyerbu markas Gunco (Kepala Distrik) yang dianggap sebagai kepanjangan tangan Jepang untuk memeras rakyat. Namun perlawanan rakyat yang tidak sebanding ini dapat dipadamkan oleh Jepang. Kedua pimpinan perlawanan rakyat tersebut dihukum dan dijatuhi hukuman mati di depan rakyat Wanci.

Pada masa pendudukan Jepang ini, Sulawesi Tenggara mempunyai dua raja yaitu *Raja Tekaka* sebagai raja I yang berkedudukan di Kendari dan *Kapiten Lasendra* sebagai raja II yang berkedudukan di Wawotobi. Sedangkan para kepala *onderdistrict* tetap menjalankan tugas dan berganti nama menjadi *Gunco* dan kepala kampung menjadi *Sonco*.

Jepang akhirnya menyerah pada Sekutu menyusul jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Meskipun Jepang telah menyerah kepada Sekutu, perlawanan rakyat Sulawesi Tenggara terhadap Jepang masih terus bermunculan. Insiden yang terjadi di Kombobaru (Kolaka) 19 November 1945, yaitu penyerangan rakyat dengan menawan 1 peleton tentara Jepang.

Sementara itu organisasi-organisasi kepemudaan juga bermunculan untuk terus bergerak melakukan perlawanan terhadap Jepang sampai seluruh tentara Jepang ditarik dari wilayah Sulawesi Tenggara. Organisasi-organisasi kepemudaan itu antara lain: *Pemuda Republik Indonesia (PRI)*, *Gerakan Kemerdekaan Rakyat (GKR)* dan *Pembela Kemerdekaan Rakyat (PKR)*.

G. PERIODE KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itulah mulai pembabakan baru sejarah bangsa Indonesia. Terjadi berbagai perubahan termasuk sistem pemerintahan di daerah. Pada saat Republik Indonesia ini berdiri tahun 1945, seluruh wilayah Sulawesi termasuk Sulawesi Tenggara ditetapkan menjadi satu provinsi yaitu Provinsi Sulawesi dengan gubernurnya *G.S.S.J. Ratulangie*. Namun, keberadaan Provinsi Sulawesi ini tidak bertahan lama, karena pada saat Sekutu tiba di Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang ternyata kedatangannya telah diboncengi oleh *NICA (Netherlands Indies Civil Administration)*. Gubernur G.S.S.J. Ratulangie ditangkap oleh NICA dan diasingkan ke Serui, Papua.

Menyadari bahwa untuk menguasai kembali Indonesia sangat sulit maka Belanda mencetuskan gagasan negara Federal. Untuk memuluskan gagasan tersebut tanggal 15-25 Juli 1946 diadakan *Konferensi Malino* yang menghasilkan keputusan bahwa negara Indonesia harus terbentuk negara federasi dan kedaulatan berada di tangan Belanda. Hasil Konferensi tersebut dimatangkan kembali pada *Konferensi Denpasar* tanggal 24-28 Desember 1946. Dalam konferensi ini lahirlah Negara Indonesia Timur (NIT) yang selanjutnya menjadi salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Menurut pasal 14 hasil konferensi ini, NIT terdiri dari 13 daerah yaitu Sulawesi Selatan termasuk Sulawesi Tenggara, Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sangehe Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Timor dan Flores, Sumbawa dan Sumba. Sejak saat itu berakhirlah Provinsi Sulawesi.

Ketika tentara NICA masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara, perlawanan rakyat yang dimulai sejak menentang pendudukan Jepang masih terus berkobar untuk melawan penjajahan. Perlawanan rakyat ini walau pun dalam skala yang kecil terus berlangsung hingga pengakuan kedaulatan Negara Indonesia ditandatangani oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil *Konferensi Meja Bundar*.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pada saat itu pula RIS (Republik Indonesia Serikat) telah bubar. Provinsi Sulawesi diaktifkan kembali dengan mengangkat **B.W. Lapien** sebagai Gubernur dengan ibukota provinsi berada di kota Bau-Bau.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pembangunan daerah maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua yaitu Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara. Pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 ditetapkan perubahan status dari daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara menjadi daerah otonom Provinsi Tingkat I dengan Kendari sebagai ibukota dan **J. Wajong** sebagai gubernur pertama Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak saat itu,

secara resmi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

H. SULAWESI TENGGARA DALAM KHASANAH ARSIP

Materi arsip yang dapat ditampilkan dalam naskah **Citra Sulawesi Tenggara dalam Arsip** meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dari masa kerajaan hingga masa kemerdekaan yang dapat menggambarkan perjalanan sejarah Sulawesi Tenggara.

Secara **geografis** Sulawesi Tenggara dapat ditampilkan melalui wilayah distrik Kendari tahun 1921, di kepulauan Tukang besi yang terdiri dari pulau Binongko, Pulau Tomia, Pulau Kaledupa, Pulau Wangi-wangi. Kemudian situasi wilayah Pulau Buton tahun 1934, wilayah Lasalimu sampai pada peta Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat tahun 2003 oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Dalam perkembangan Sulawesi Tenggara tidak dapat lepas dengan perkembangan Kasultanan Buton. Melalui arsip dapat ditampilkan perjanjian-perjanjian yang dapat menggambarkan hubungan kerajaan Buton dengan pemerintah Belanda dan hubungan kerajaan Buton dengan kerajaan-kerajaan lain disekitarnya seperti Ternate, Bone dan Gowa. Kegiatan yang dilakukan masa Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kunjungan pejabat pemerintah pusat ke Sulawesi Tenggara, serah terima jabatan dari gubernur Andi Pangerang kepada H.Andi Rivai, keputusan tentang perubahan wilayah administrasi dan lain-lain yang dapat menggambarkan ikatan hubungan kegiatan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Bidang **Pertahanan dan Keamanan** dapat ditampilkan melalui arsip-arsip perjanjian kerajaan dengan pemerintah Hindia Belanda tentang larangan ekspor impor senjata/amunisi dan keperluan perang di wilayah Buton, pembangunan lapangan terbang militer di Buton, keadaan keamanan di wilayah Muna dan lain-lain.

Bidang **ekonomi** dapat ditampilkan laporan ekspedisi kapal dagang ke Buton, kontrak perdagangan VOC di Buton, penarikan pajak cukai, dan melalui arsip-arsip foto dapat

ditampilkan kehidupan pekerja tambang aspal di Buton, pengrajin perak dan mutiara.

Sedangkan pada bidang **kebudayaan** dapat menampilkan arsip-arsip foto tentang berbagai jenis perahu, rumah adat daerah Buton, alat musik, dan tarian adat Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri (2005), *Profil Provinsi Republik Indonesia; Sulawesi Tenggara*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta

Departemen Pendidikan an Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (1983), *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sulawesi Tenggara*, 1983/1984.

[Http://www.Sultra.go.id](http://www.Sultra.go.id)

Kartodirdjo, Sartono (1987), *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900; Dari Emporium sampai Imperium*, Jakarta; PT.Gramedia.

Marsono (2005). *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: CV Eko Jaya.

Rickefs,M.C.(2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Soejito, Irawan. (1984). *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

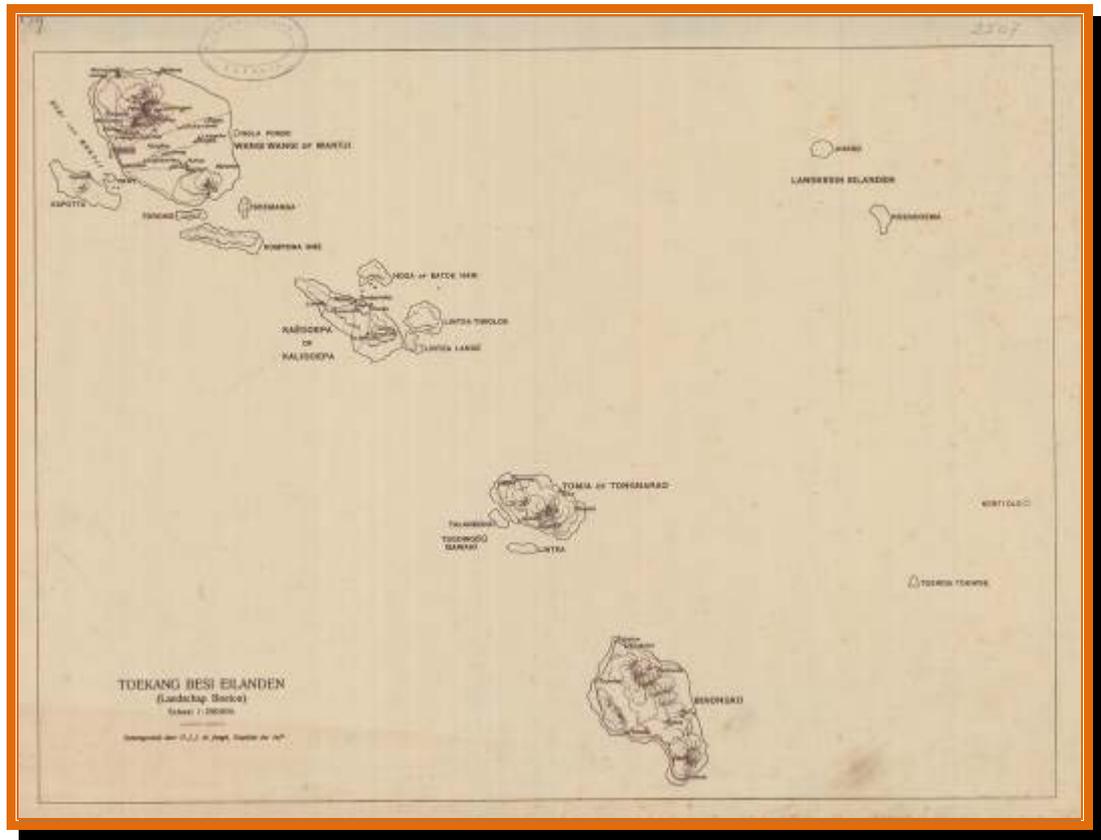
Zuhdi, Susanto. (2000). *Kesultanan Buton (Desertasi diterbitkan)*

CITRA SULAWESI TENGGARA DALAM ARSIP

[Type text]

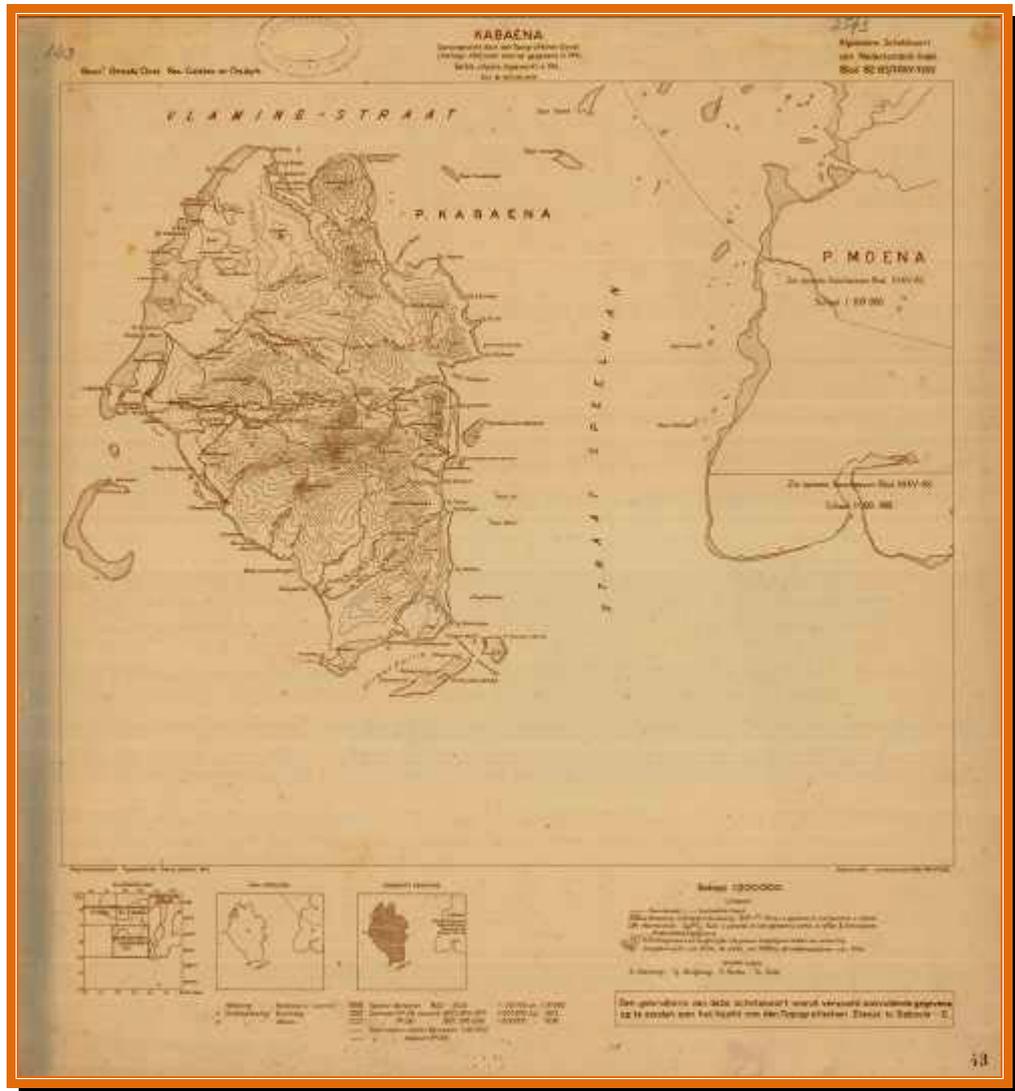
geografi

[Type text]



Peta Kepulauan Toekang Besi, Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Pulau Binongko, Tomia - Tongnarao Kali Doepa, Wangi-wangi - Wanji, 1941

ANRI: 2507/139



Peta Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara dan sekitarnya
1941.

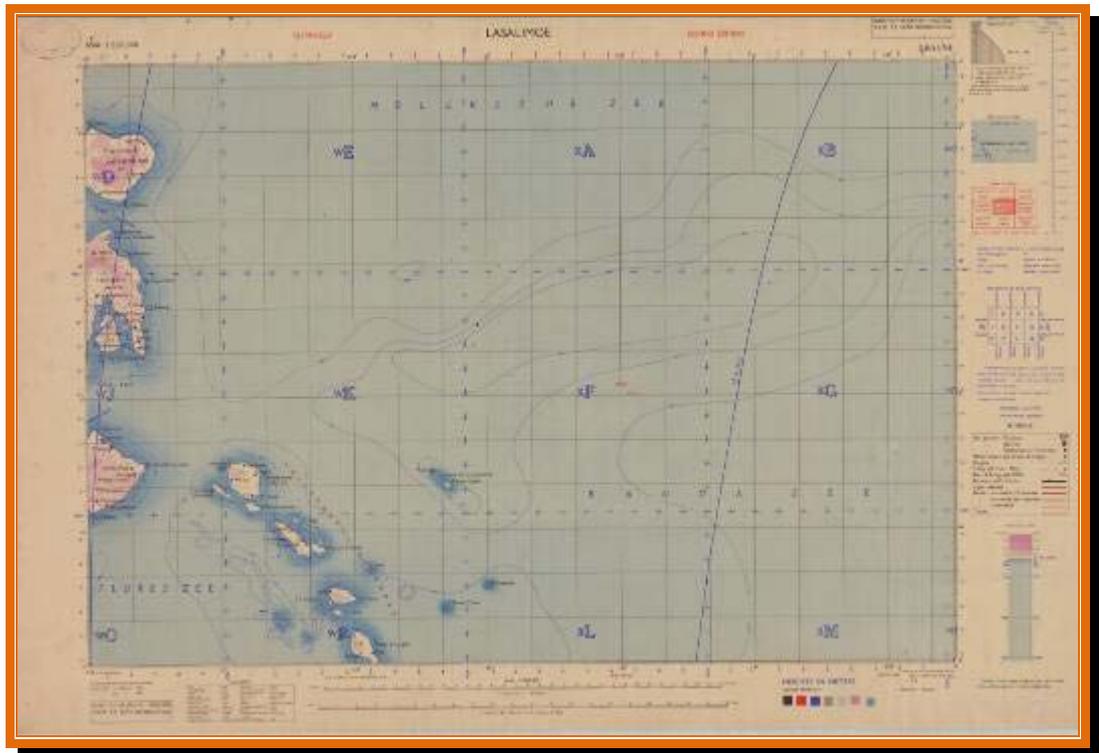
ANRI : 2543/Blad 82.83/XXXIV – XXXV

[Type text]



Peta Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
1943.

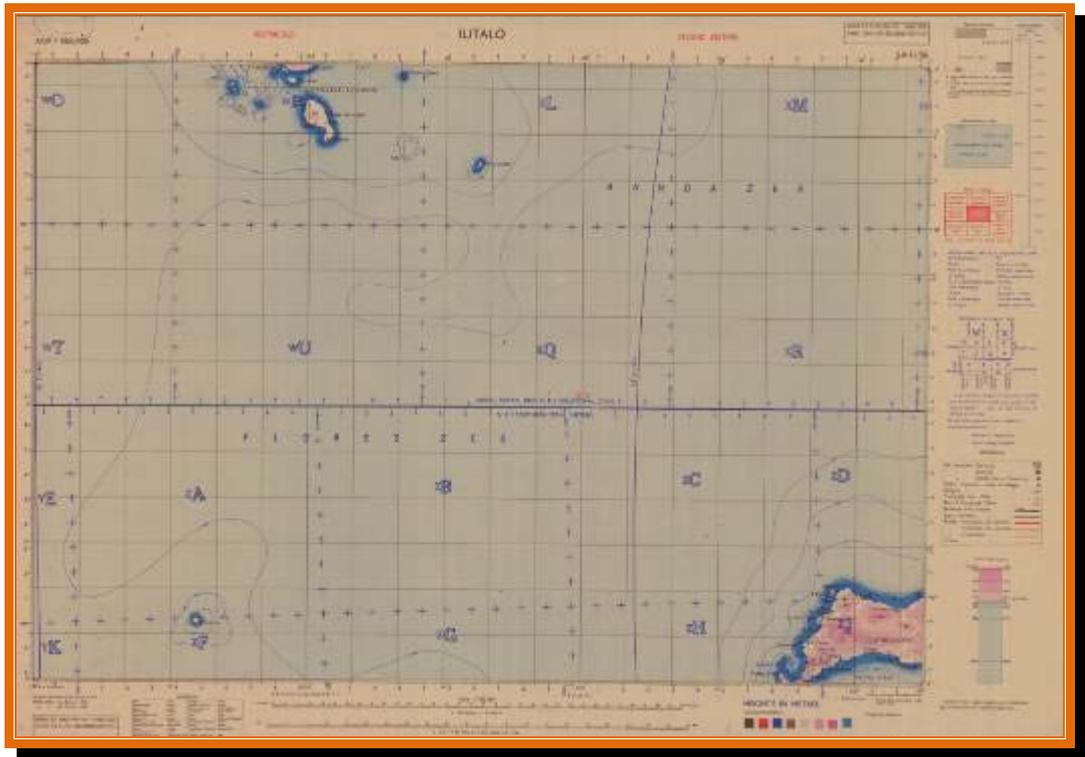
ANRI: 2506/Sheet No. 1/138



Peta Lasalimoe, Sulawesi Tenggara
1946.

ANRI: 87/SB 51 ME/5 Sulawesi Tenggara

[Type text]



Peta Pulau Ilitalo, Sulawesi Tenggara
1946

ANRI: 88/SB 51 SE/5



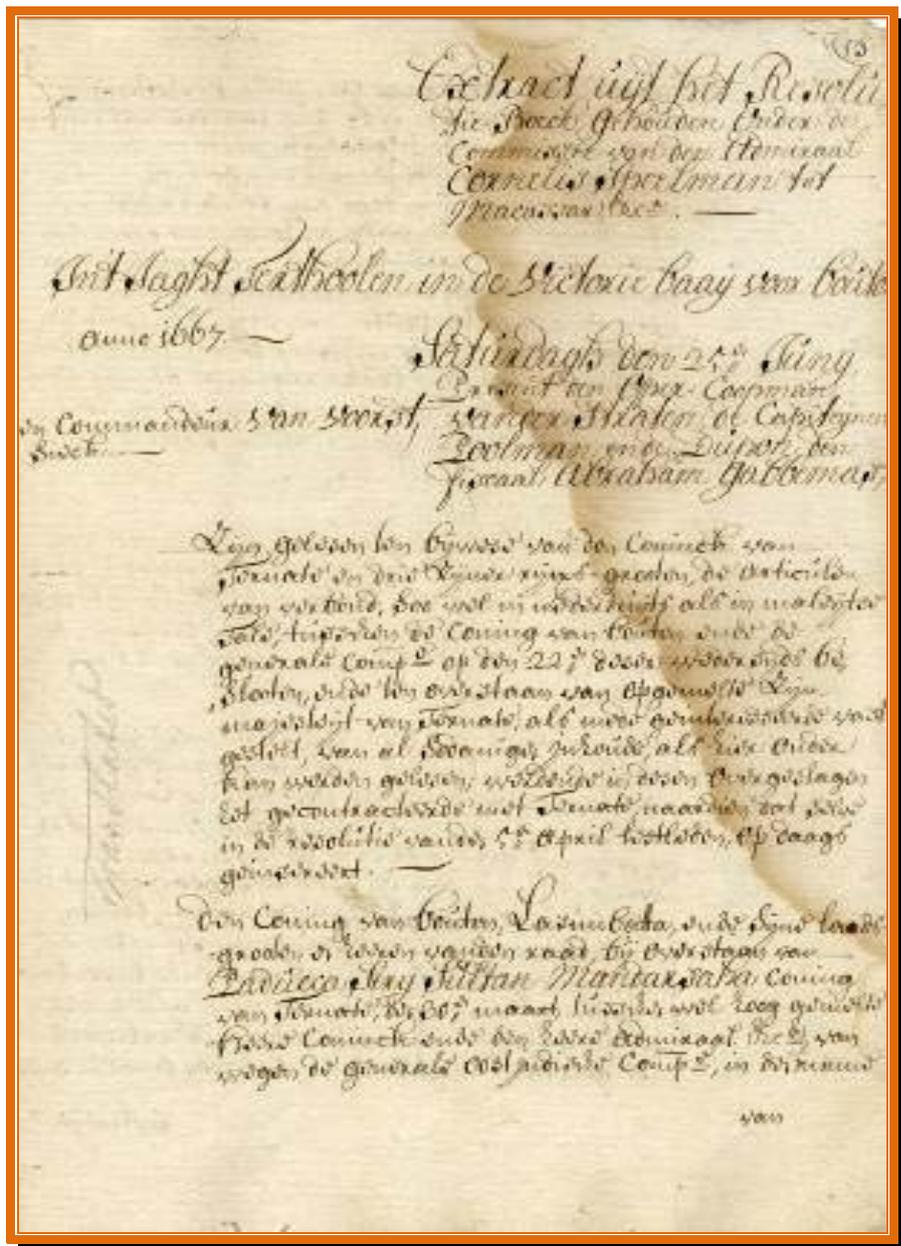
Peta Provinsi Sulawesi Tenggara
2003

ANRI: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

[Type text]

politik dan pemerintahan

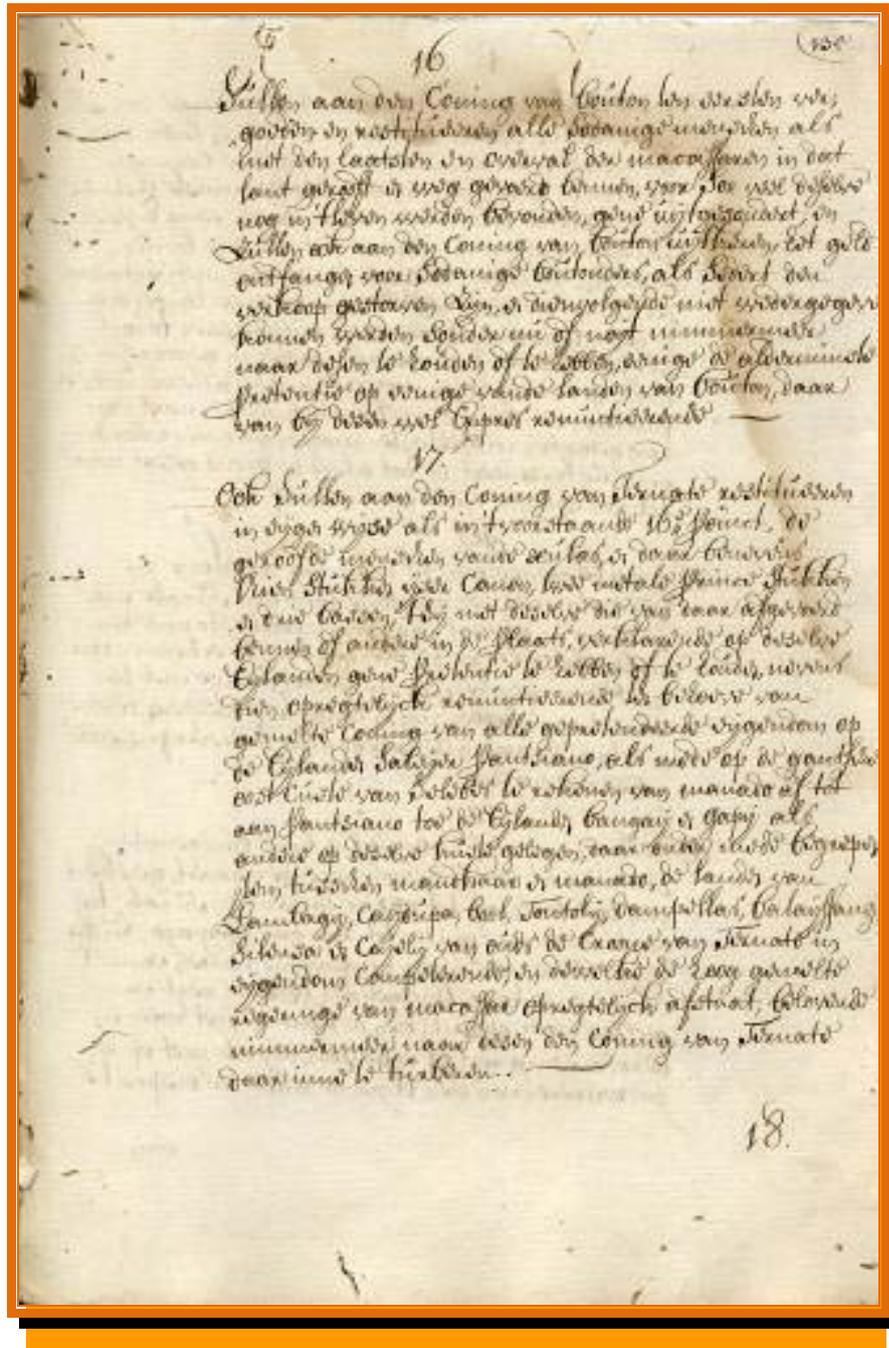
[Type text]



Intisari Keputusan *Comissie Admiraal* Cornelis Speelman tentang penjelasan dan konfirmasi kontrak perjanjian antara Sultan Buton, Losimbotto dan Paduka Sri Sultan Mandarsaba, Sultan Ternate mengenai perdagangan, tempat tinggal penduduk, padi dan beras,
25 Juni 1667

ANRI: Makassar 275 / 2

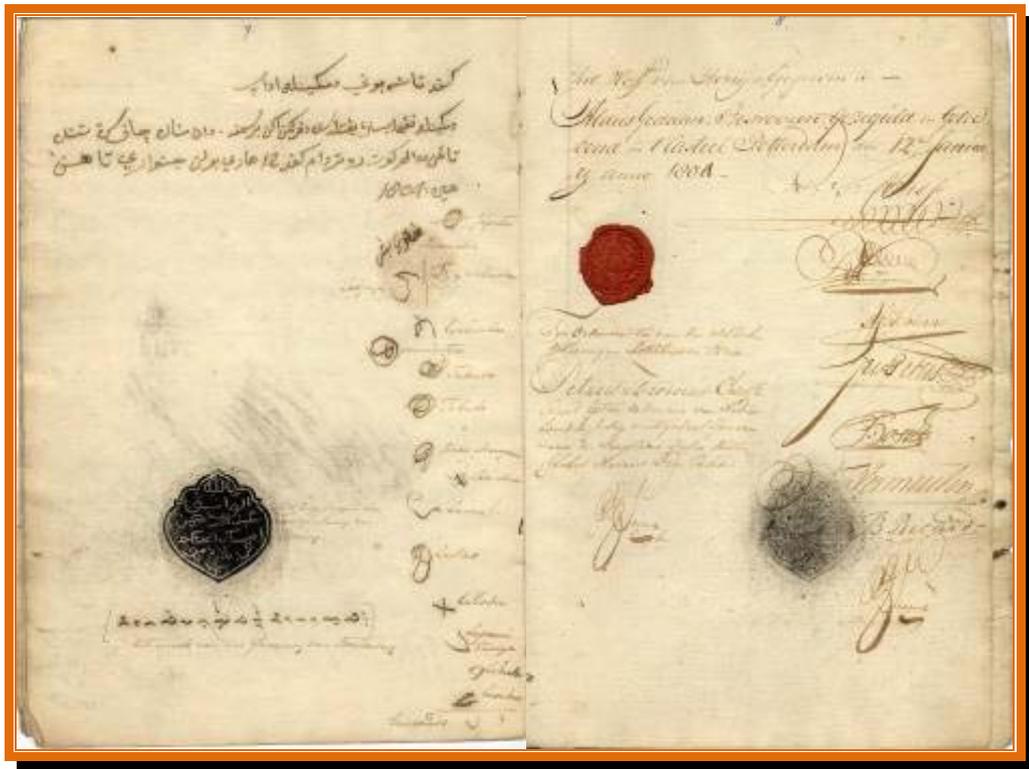
[Type text]



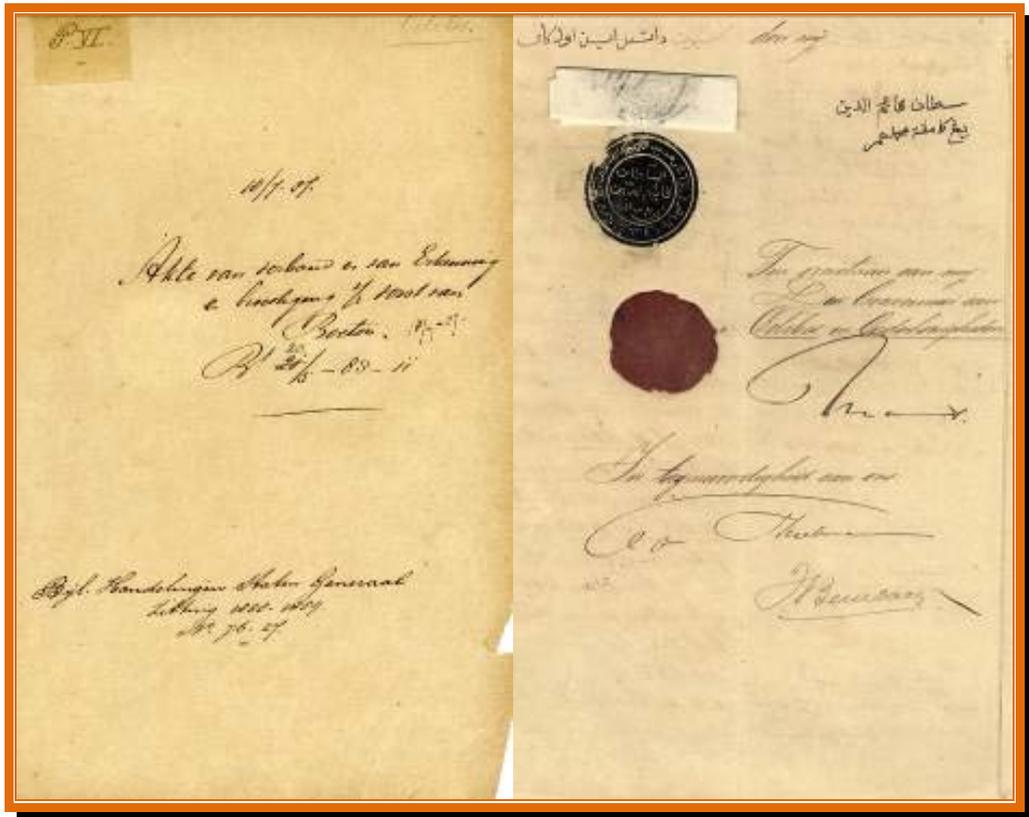
Penjelasan pasal 16 pada kontrak perjanjian antara Paduka Sri Sultan Hasannudin Sultan Makassar dengan Cornelis Speelman tentang ganti rugi dan pengembalian pasukan kepada Sultan Buton akibat penyerangan tiba-tiba oleh Kesultanan Makassar, 18 November 1667.

ANRI: Makasser 275/2

[Type text]

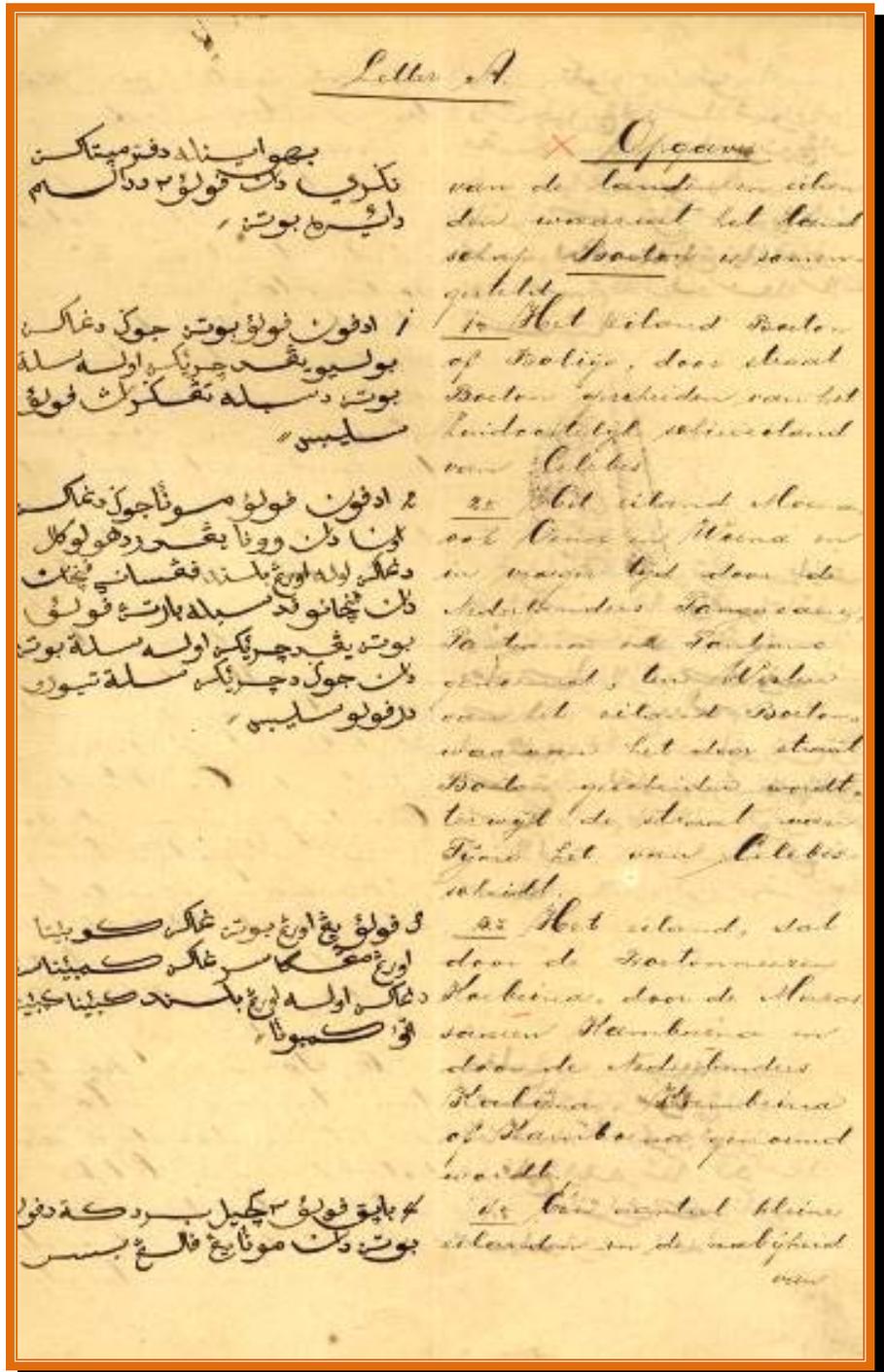


Kontrak Perjanjian antara Sultan Asararodini dari Kerajaan Buton dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang perpanjangan kontrak perdagangan serta pengakuan kedaulatan Sultan Asararodini sebagai penguasa tertinggi di wilayah Buton dan sekitarnya,
12 Januari 1804,
ANRI: Makassar 375/48



Akte Persetujuan Mohamad Saleh atas nama Sultan Buton Kayanoeddin III yang telah wafat 16 Juni 1886 tentang Penguasaan Wilayah Buton kepada Kayamoeddin IV sebagai Sultan Sapati dengan nama Mohamad Oemar, 20 Mei 1888.

ANRI: Bt. 20 Mei 1888 No. 11 (Kontrak Celebes A/9)



Lampiran A Kontrak tertutup mengenai penjelasan daerah-daerah yang termasuk wilayah Buton.

8 April 1906

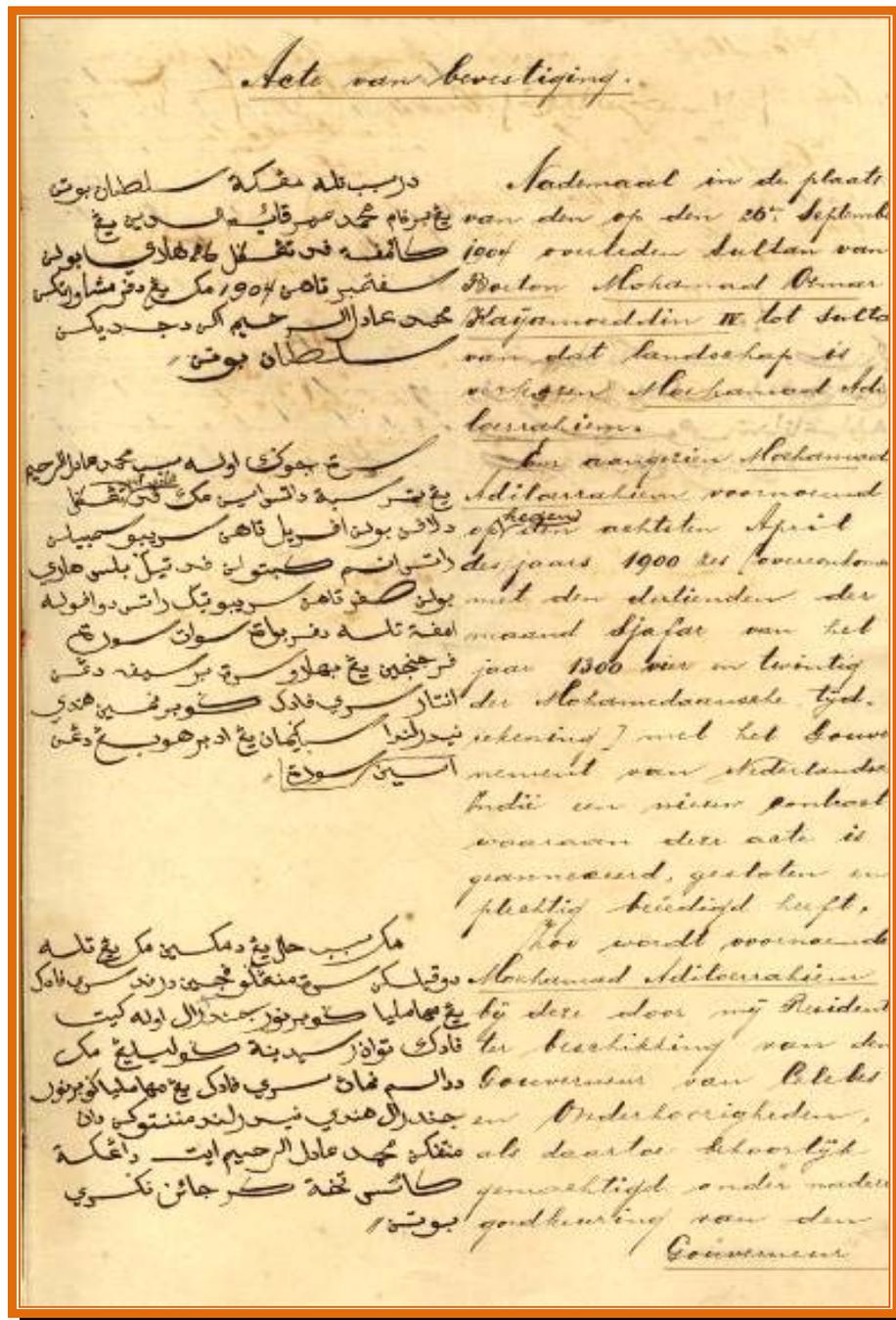
ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 25 (Kontrak Celebes A/9)



Lampiran kontrak tertutup mengenai penjelasan pasal 13 yang berhubungan dengan pembagian wilayah Pelabuhan Buton atau Bolio.

8 April 1906

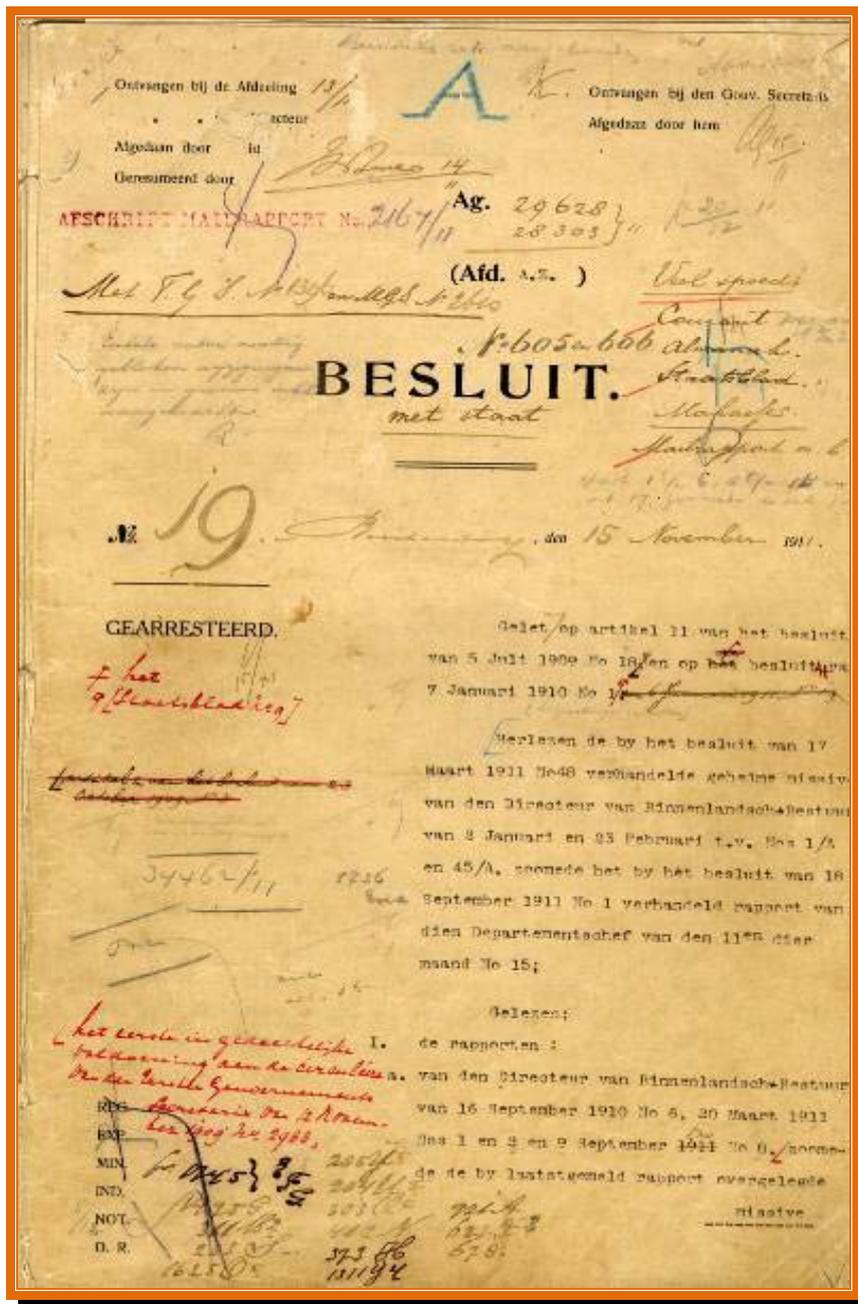
ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 25 (Kontrak Celebes A/9)



Salinan akte persetujuan pemilihan Moehamad Adiloerrahiem sebagai Sultan Buton menggantikan Mohamad Oemar Kaijamoeddin IV yang telah wafat.

8 April 1906.

ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 25 (Kontrak Celebes A/9)



Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 19 tahun 1911 tentang pembagian wilayah Celebes (Sulawesi) dan wilayah-wilayah dibawah kekuasaannya menjadi 7 (tujuh) wilayah bagian/ afdeeling, dimana dahulu Buton menjadi ibukota Afdeeling Sulawesi Timur,

15 November 1911

ANRI: Bt. 15 November 1911 No. 19

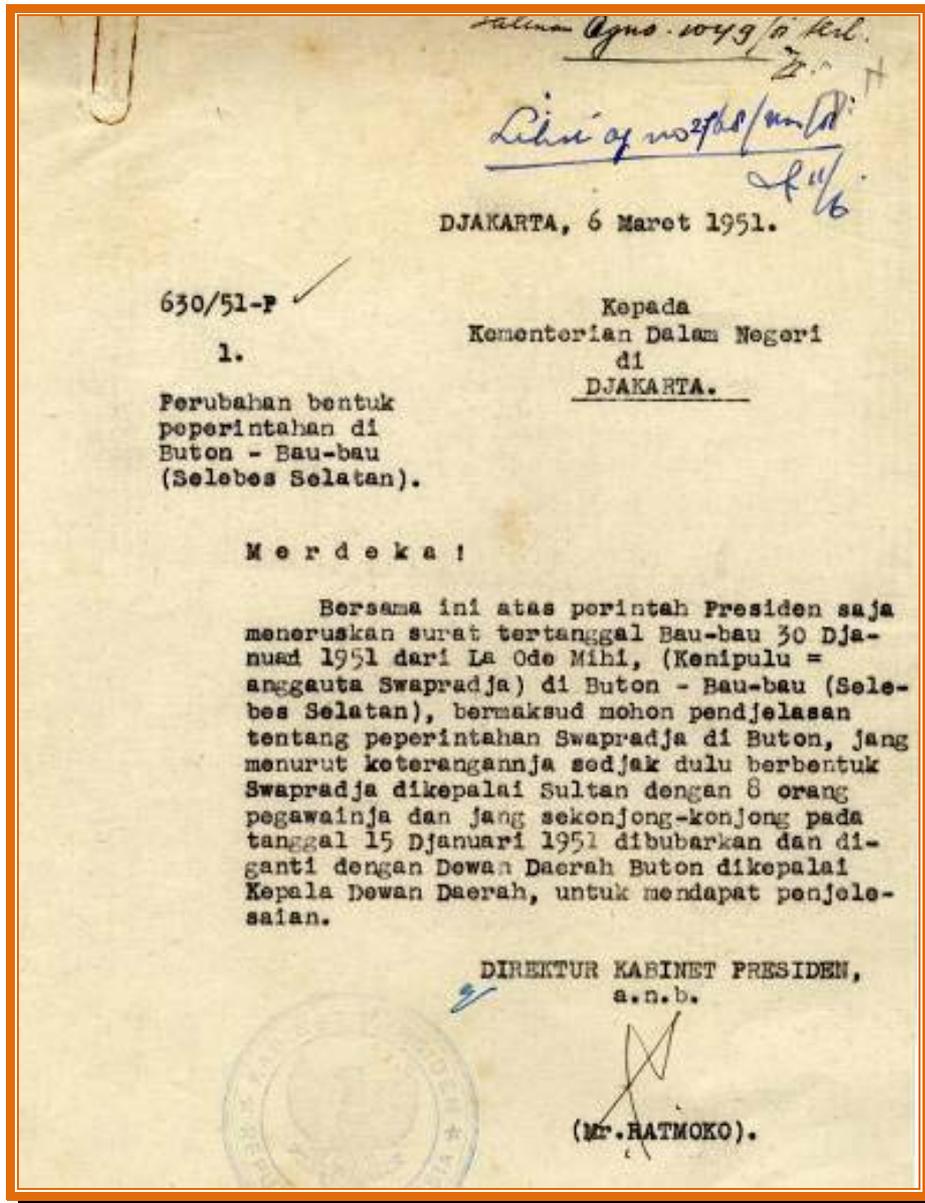
[Type text]



Menteri pertama Kesultanan Buton
1913

ANRI: KIT 326/4

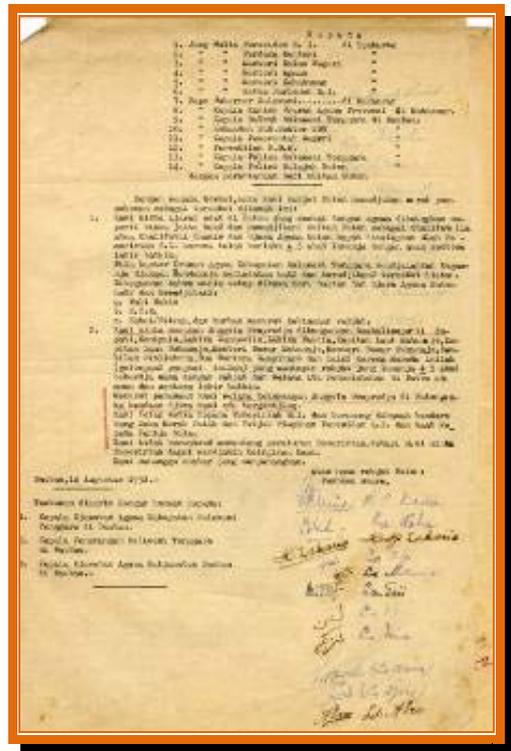
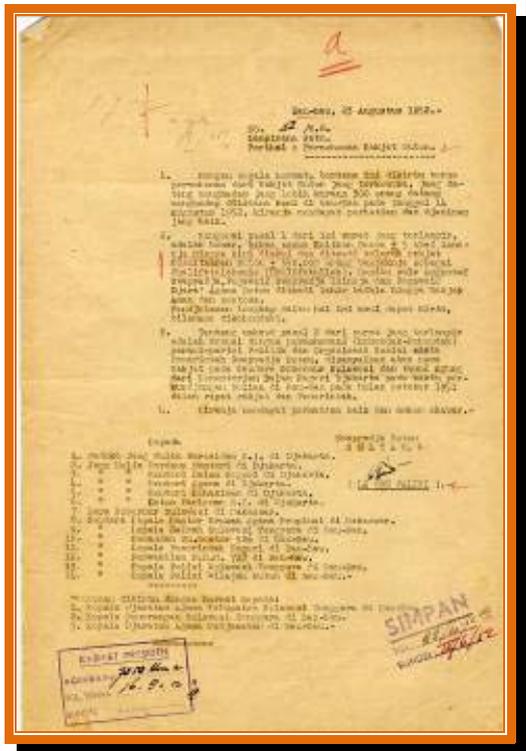
[Type text]



Surat kepada Kementerian Dalam Negeri dari Direktur Kabinet Presiden tentang perubahan bentuk pemerintahan di Buton, Bau- Bau (Celebes Selatan), dari Swapraja Buton yang dikepalai Sultan menjadi Dewan Daerah Buton yang dikepalai oleh Kepala Dewan Daerah,
6 Maret 1951

ANRI: Kabinet Presiden 830

[Type text]



Surat Swapraja Buton Sultan Buton La Ode Falihi kepada Presiden RI tentang permohonan rakyat Buton agar hak dan kewajiban Sultan sebagai khalifatullah tetap diakui oleh Pemerintah RI, 23 Agustus 1952.

ANRI: Kabinet Presiden 851



Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro pada upacara
penyambutan di Bau-bau Buton dalam rangka menghadiri
Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Sulawesi Tenggara
24 Maret 1953.

ANRI: Djapen M 8217

[Type text]



Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro berpidato dalam upacara Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara
24 Maret 1953.

ANRI: Djapen M 8222



Pemeriksaan barisan kehormatan oleh Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Mr. Sartono di lapangan terbang Kendari dalam rangka kunjungan Presiden ke Sulawesi Tenggara,
19 Juni 1959

ANRI: Kempen 590619 RR 4



Aubade oleh anak-anak sekolah di Kendari untuk menyambut
Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI) Mr. Sartono pada
kunjungan Presiden ke Sulawesi Tenggara,
19 Juni 1959

ANRI: Kempen 590619 RR 7

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1959

TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II
DI SULAWESI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sedjak tanggal 18 Januari 1957 perlu segera dilaksanakan pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II atas dasar Undang-undang tersebut di Sulawesi;
- b. bahwa setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untuk peningkatan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerah swatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956 serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yang bersangkutan, Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk - sesuai dengan pasal 73 ayat (4) Undang-undang tersebut sub a diatas - melaksanakan pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dimaksud;
- Mengingat : 1. pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6) sebagaimana sedjak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

M E M U T U S K A N :

I. A. Dengan mentjabat :

a. Undang-undang Darurat :

- No.2 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.2) tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Djenepono-Takalar;
 - No.3 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.3) tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toradja dan Daerah Luwu;
 - No.4 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.4) tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wadjo dan Daerah Soppeng;
- b. Semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain aturan-aturan perundangan yang bersangkutan dengan pembentukan Daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud dibawah ini;

B. Membubarkan :

a. Daerah-daerah :

- Kota Manado yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1953 jo. Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1954, (Lembaran Negara 1953 No.87 dan Lembaran Negara 1954 No.97);
- Kepulauan Sangihe dan Talaud yang dimaksud oleh Undang-undang N.T.P. No.44 tahun 1950 (Staatsblad 1946 No.143, Staatsblad 1948 No.73 dan Statuut Daerah dimaksud tanggal 20 Maret 1948;

Bagian awal dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi,
4 Juli 1959

ANRI: Sekretariat Kabinet UU Darurat 316



Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipi Gandamana
membacakan sumpah pada Pelantikan dan Serah Terima
Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan-Tenggara
dari Andi Pangerang kepada H. Andi Rivai
20 April 1960.

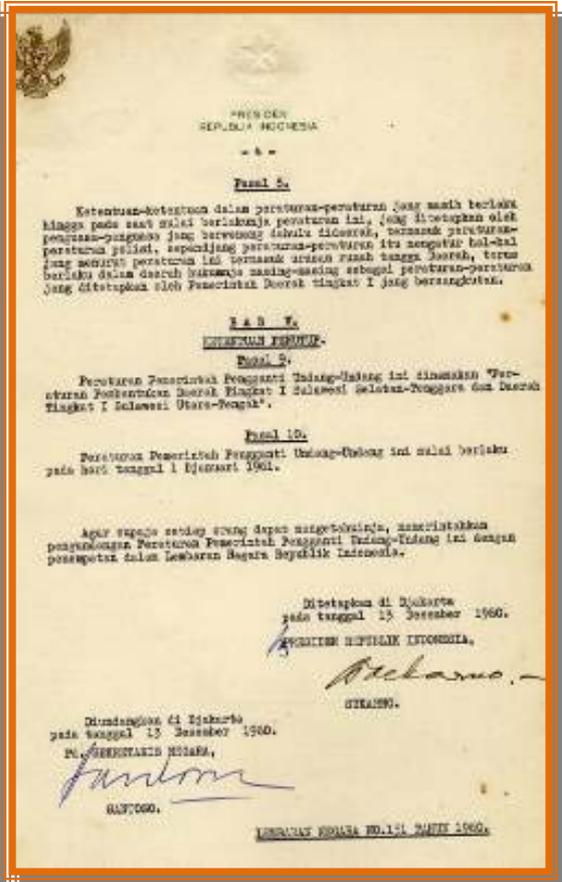
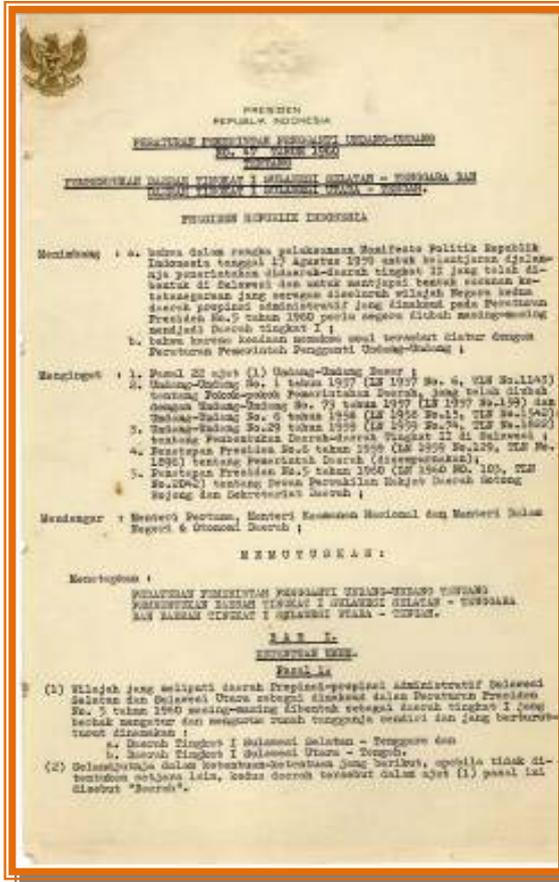
ANRI: Djapen M 15836



Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara yang baru H. Andi Rivai pada Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara dari Andi Pangerang kepada H. Andi Rivai, 20 April 1960.

ANRI: Djapen M 15845

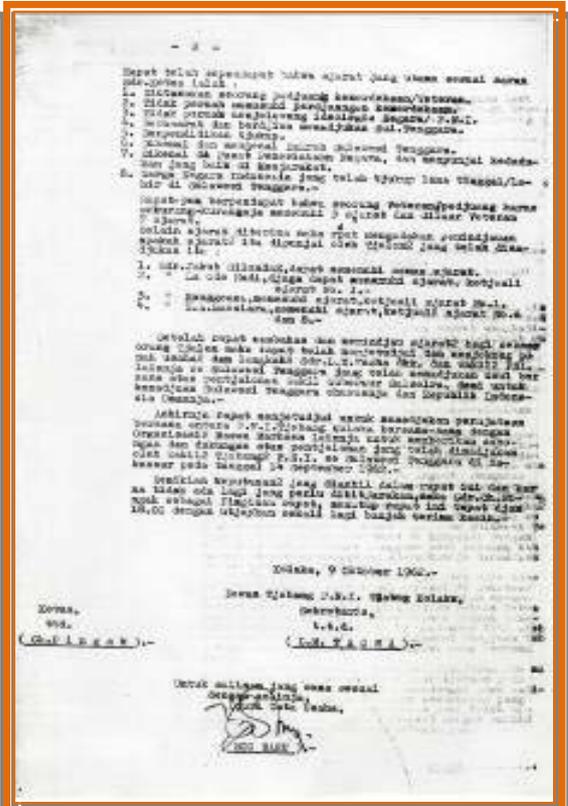
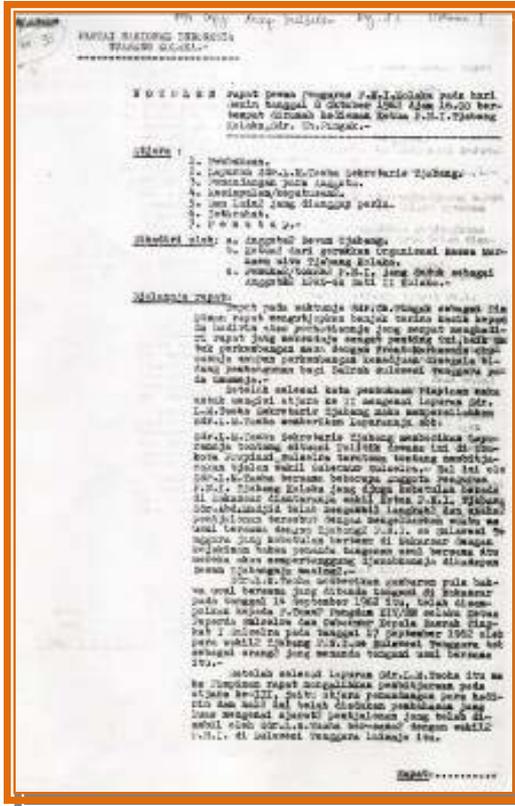
[Type text]



Bagian awal dan akhir dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah, 13 Desember 1960.

ANRI: Sekretariat Kabinet Perpu 77

[Type text]



Notulen rapat Dewan Pengurus Partai Nasional Indonesia
(PNI) Kolaka, Sulawesi Tenggara.
8 Oktober 1962.

ANRI: Pemda Sulselra 42



Kunjungan Menteri Bina Marga Brigjen Hartawan ke Buton,
tampak Bapak Menteri berkalung Bunga
sedang melambaikan tangan,
23 Agustus 1965.

ANRI: Kempen 65-10063

[Type text]



Sambutan Masyarakat Buton pada
Menteri Bina Marga Brigjen Hartawan
23 Agustus 1965.

ANRI: Kempen 65-10077



Menteri Bina Marga Brigjen Hartawan sedang memberikan sambutan pada masyarakat Buton, 23 Agustus 1965.

ANRI: Kempen 65-10079

AMARAN PEMERINTAH PRESIDEN SUKARNO PADA PERINGATAN HARI
PAHLAWAN DAN PEMBERILAN TANDA JASA BINTANG MAHA PUTRA III
KEPADA ALMARHUM ROBERT WOLTER MONGINSIDI DI ISTANA NEGARA,
DJAKARTA, 10 NOPEMBER 1965.

Saudara-Saudara,

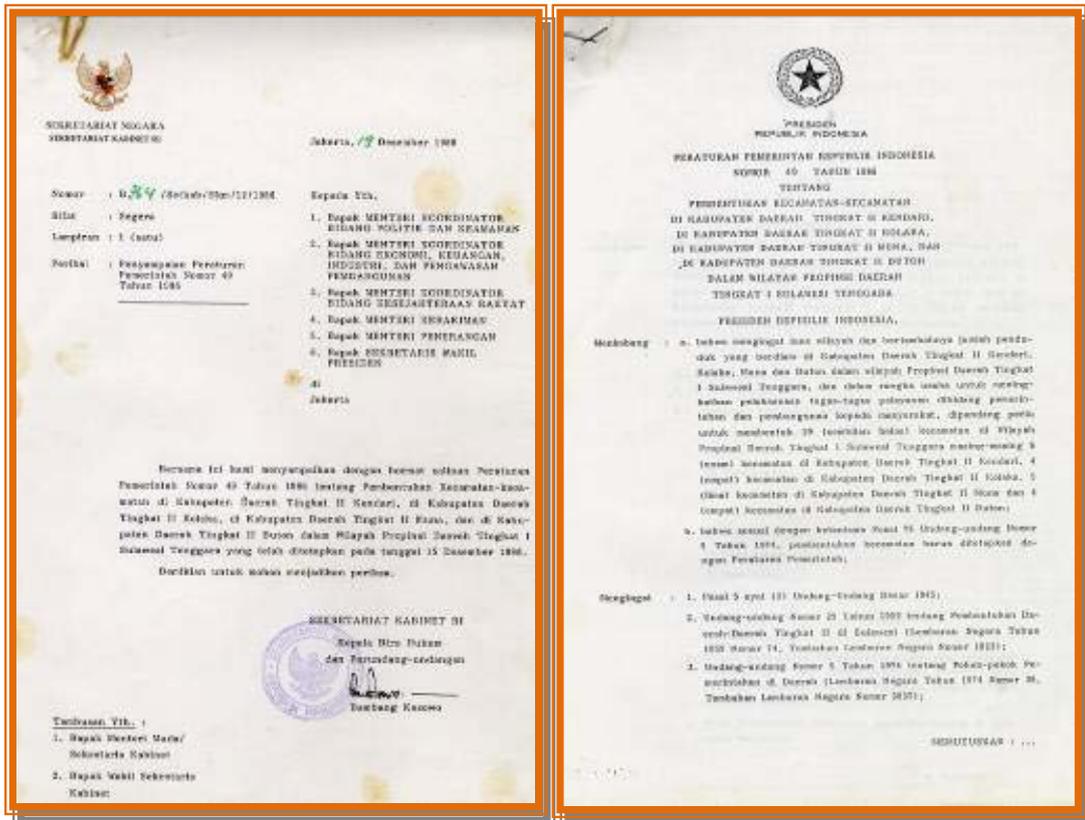
Hari Pahlawan, 10 Nopember, yang saudara-saudara semuanya mengetahuinya dulu saja tentukan 10 Nopember itu resmi sebagai Hari Pahlawan, oleh karena pada tanggal 10 Nopember 1945-lah beradak di Surabaya perbustan-perbustan kepahlawanan daripada bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, mempertahankan kemerdekaan bangsa kita, 10 Nopember 1945 di Surabaya. Maka berhubung dengan itu hari 10 Nopember itu saja ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Dan tiap-tiap tahun 10 Nopember kita peringati dengan memperingati arwah-arwah pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah gugur mendahului kita dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara dan bangsa itu.

Saja dengan bangga saudara-saudara, dengan bangga bisa mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah salah satu bangsa yang banyak sekali mempunyai pahlawan-pahlawan, bukan saja itu, tetapi pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Pernah saja menceritakan kepada orang-orang rasul bahwa pada suatu waktu kita didatangi disini oleh seseorang Tuan Agung. Terus terang saja pada waktu itu ialah Madame Pandit, Widjaja Laksmi Pandit, sekarang almarhum Jawaharlal Nehru, datang di Indonesia. Dan saja bawa beliau keliling ke beberapa tempat di Indonesia ini. Bukan saja di Djakarta, tetapi saja bawa beliau itu ke Bandung, ke Jogja, ke Sala, ke Bali dan lain-lain tempat. Dan di tiap-tiap tempat yang kami bawa beliau itu, beliau melihat adanya teman-teman pahlawan, beliau keluar air matanya, sambil berkata, hal yang demikian ini kami di India tidak mempunyai, teman pahlawan. Such things we have not in India, kata beliau. Tapi di Indonesia dimana-mana. Madame Widjaja Laksmi melihat adanya teman-teman pahlawan. Bahkan kadang beliau misal saja di Bali mendengar dari mulut saja, bahwa di satu tempat ketjil, Tabanan, ada teman pahlawan dengan kuburan hampir 1000 buah, hampir 1000 buah pahlawan Tabanan. Itu satu bukti, kata beliau, dan perkataan beliau itu adalah tepat, bahwa Indonesia ini mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan, bukan perjuangan yang ketjil tetapi perjuangan yang maha hebat, perjuangan yang nanta korban-korban jiwa dan raga yang maksimal-maksimalnya.

Berhubung dengan itu maka beliau meneteskan air matanya. Dan berhubung dengan itu pula saja dengan bangga membenarkan perkataan beliau, yes, Indonesia has achieved its independence with sacrifices and with

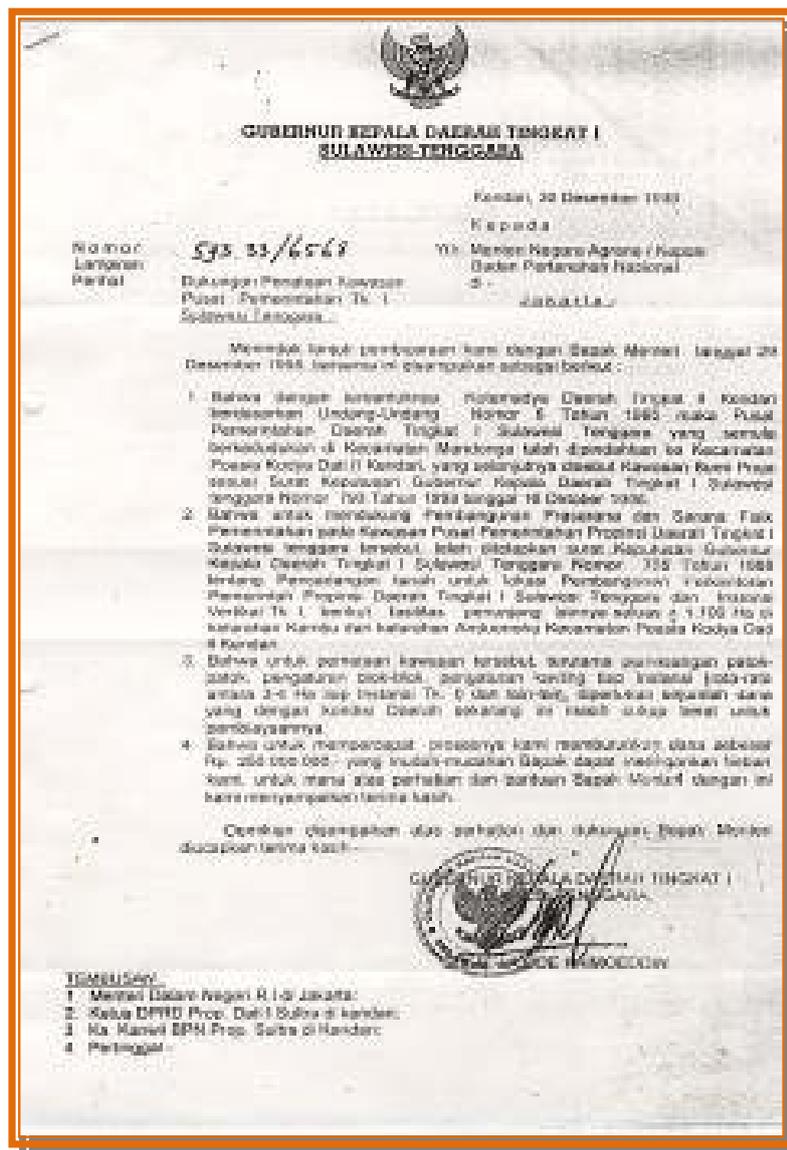
Pidato Presiden Soekarno pada peringatan Hari Pahlawan dan Pemberian Tanda Jasa Bintang Maha Putra III kepada Almarhum Robert Wolter Monginsidi di Istana Negara, Jakarta 10 Nopember 1965.

ANRI: Pidato Presiden 822



Surat Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet RI, Bambang Kesowo kepada Sekretaris Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah tentang Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1986 mengenai Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 19 Desember 1986.

ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah 641



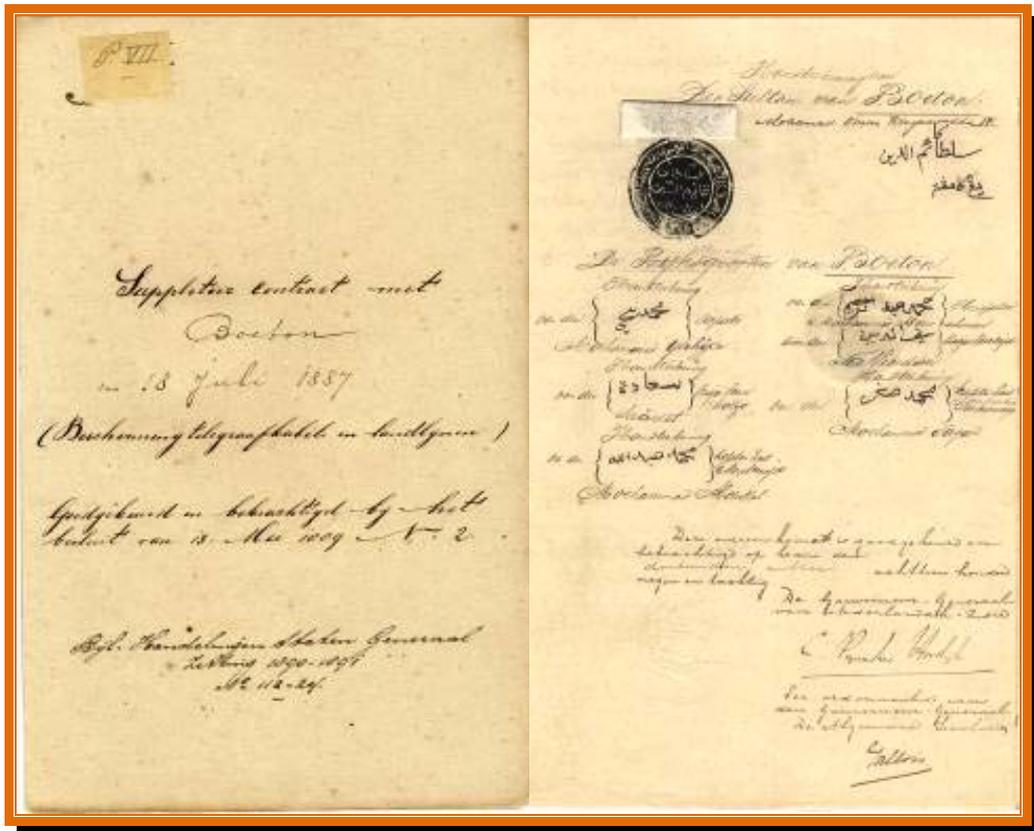
Surat dari Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari tentang dukungan penataan kawasan pusat Pemerintahan Tingkat I Sulawesi Tenggara, 30 Desember 1998

ANRI: Badan Pertanahan Nasional 539

[Type text]

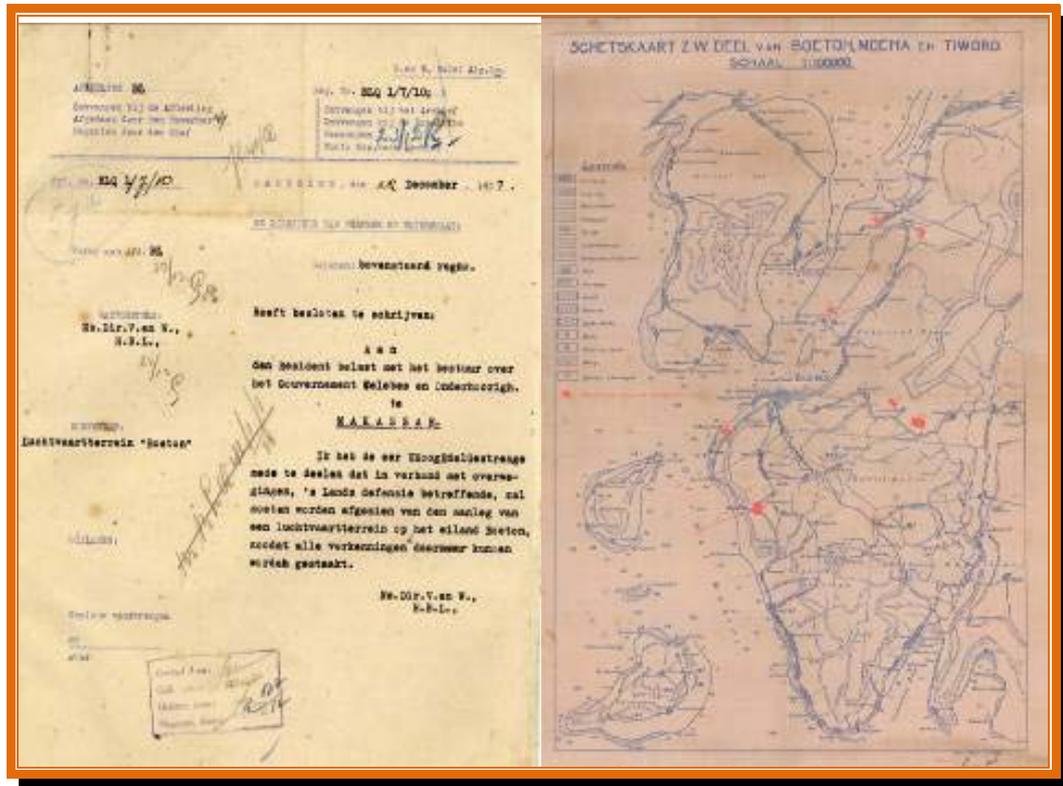
pertahanan dan keamanan

[Type text]



Kontrak perjanjian tambahan antara Daniel Francois van Braam Morris Ridder dengan Sultan Buton Mohamad Omar Kayamoeddin IV tentang hukum pidana, pelanggaran dan pengurangan hukuman, bertalian dengan garis telegraf dan kabel yang terletak di dalam dan luar wilayah Buton, 18 Juli 1887.

ANRI: Bt 13 Mei 1889 No. 2 (Kontrak Makasar A/9)



Korespondensi antara Gubernur Sulawesi dan wilayah sekitarnya
(*Gouvernement Celebes en Onderhoorigh*) dengan Direktur
Perhubungan dan Pekerjaan Umum (*Directeur van Verkeer en
Waterstaat*) tentang pembangunan lapangan terbang militer
di Buton,
3 Juli – 22 Desember 1937.
ANRI: BOW No. BL 96

TELEGRAM

Dienstgegevens, Plaats v. afzending, Nummer, Woordental, Datum, Tijd, Dienstaanwijzingen

87 MAKASSAR 11 9/4 0920

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA BATAVIAC

GABUNGAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA MELINGKUNGI 18 PARTAI/PARTAI POLITIK KOMMA BADAN PIMPINAN PEMUDA INDONESIA GABUNGAN 11 ORGANISASI PEMUDA KOMMA GABUNGAN 5 ORGANISASI WANITA KOMMA SEMUANJA BERKEDUDUKAN MAKASSAR COLON MEMPERHATIKAN PENOLAKAN HHVVK ~~3000000~~ TERHADAP GRATIE WOLTER ~~000000~~ MONGINSIDI SEORANG PELDOR PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA SULAWESI SELATAN JANG MENDAPAT HUKUMAN MATI SEMICOLON MERASA PENOLAKAN ITG TIDAK SESUAI RUM ROYEV STATEMENT DAN MENGERUHKAN SUASANA POLITIK NEDERLAND INDONESIA SEMICOLON MENINGAT PEMBERESAN DJALAN PERUNDINGAN PERUNDINGAN DAN ~~000000000~~ KONSWENSI KONSEKSENSI POLITIK KOMMA DIANTARANJA MENGENAI TAHANAN DAN HUKUMAN POLITIK SEMICOLON MENDESAK PEMBATALAN HUKUMAN MATI WOLTER MONGINSIDI FULLSTOP *

MS 11 91 DELEGASI REPUBLIK INDONESIA BTC *

Ontvangen te Bataviacentrum (Radiobedrijfscentrale) 194 ten 11:00 Javatijd. door	Overgeleid naar onder nr 194 ten door
--	---

S. 1649-05-1200-000

Telegram dari Gabungan Partai-partai Politik di Makassar kepada Delegasi Indonesi di Batavia tentang desakan pembatalan hukuman mati terhadap Wolter Monginsidi,
4 September 1949
ANRI: Delegasi Indonesia 1019



Serah terima jabatan Panglima Komando Daerah Militer Angkatan Darat Sulawesi Selatan Tenggara dari Kolonel Mattalata kepada Letkol. A.M. Jusuf Amir, 6 November 1959.

ANRI: Djapen M 15619

[Type text]

ANGKATAN DARAT
PENGUSAHA PERANG DAERAH SULAWESI.

SURAT - KEPUTUSAN
No. 029/Kpts/Peperda SST/60.

Tentang

PEMBERASAN/PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN KOORDINASI
KERJA PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA.

PANGlima DAERAH MILITER SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA
SELAKU PENGUSAHA PERANG DAERAH UNTUK DAERAH SULAWESI.

- I. **MENGORANG** : bahwa, berhubung dengan pengangkatan sdr. Abd. DJAILI SIKKI sebagai Kepala daerah Djemponto oleh J.P. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah, perlu memecahkan sdr. Tsb. sebagai anggota seksi pengawas/penjabatian Aparatur Negara Badan Koordinasi Kerja pembangunan Sulawesi Selatan dan Tenggara dan mengangkat seorang penggantinya.
- II. **MENGINGAT** : peraturan penguasa perang daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara No. 141/Prt/Peperda SST/59 tgl. 6-10-1959 tentang Badan Koordinasi Kerja pembangunan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- III. **MEMPENGHATIKAN**: surat keputusan penguasa Perang daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara No. 142/Kpts/Peperda SST/59 tgl. 6-10-1959 tentang Pengangkatan anggota2 badan koordinasi Kerja pembangunan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

IV. **MEMUTUSKAN** :

M E M E T A P E K A N :

1. a. **M e m e c a k a n :**

Sdr. Abd. DJAILI SIKKI.
Djambi Tentara Pengganti.

sebagai anggota seksi pengawas/penjabatian Aparatur Negara Badan Koordinasi Kerja pembangunan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Penguasa perang daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan ini mengutipkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan tenaga dan pikiran jala. telah ditunjukkan.

b. **M e r a g a n g k a t :**

Sdr. TAHIR BARETA.
Djambi Tentara Pengganti.

sebagai anggota seksi pengawas/penjabatian Aparatur Negara Badan Koordinasi Kerja pembangunan Sulawesi Selatan dan Tenggara, dengan tidak mempengaruhi/merebak kedudukannja dalam djabatannya jang ada sekarang.

2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
3. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diketukkannya.

Dikeluarkan di : Makassar,
pada tanggal : 18 Februari 1960.

PANGlima DAERAH MIL. SULAWESI SELATAN
PENGUSAHA PERANG DAERAH UNTUK DAERAH
SULAWESI.

A. D. S. - Kepala staf,

Kepada jang bersangkutan.

S e m b u s a n :

1. Perintah Menteri R.I.
2. Semua Menteri2/Menteri2 Muda.
3. Penguasa Perang Pusat
4. Panglima Kodam Sulawesi
5. Gubernur Sulawesi
6. Kap. Pol. Komisariat Sul.
7. P. djak. I.N.
8. Semua Penguas. Dan. Mil. Kodam Sulawesi.
9. **A r s i p .**

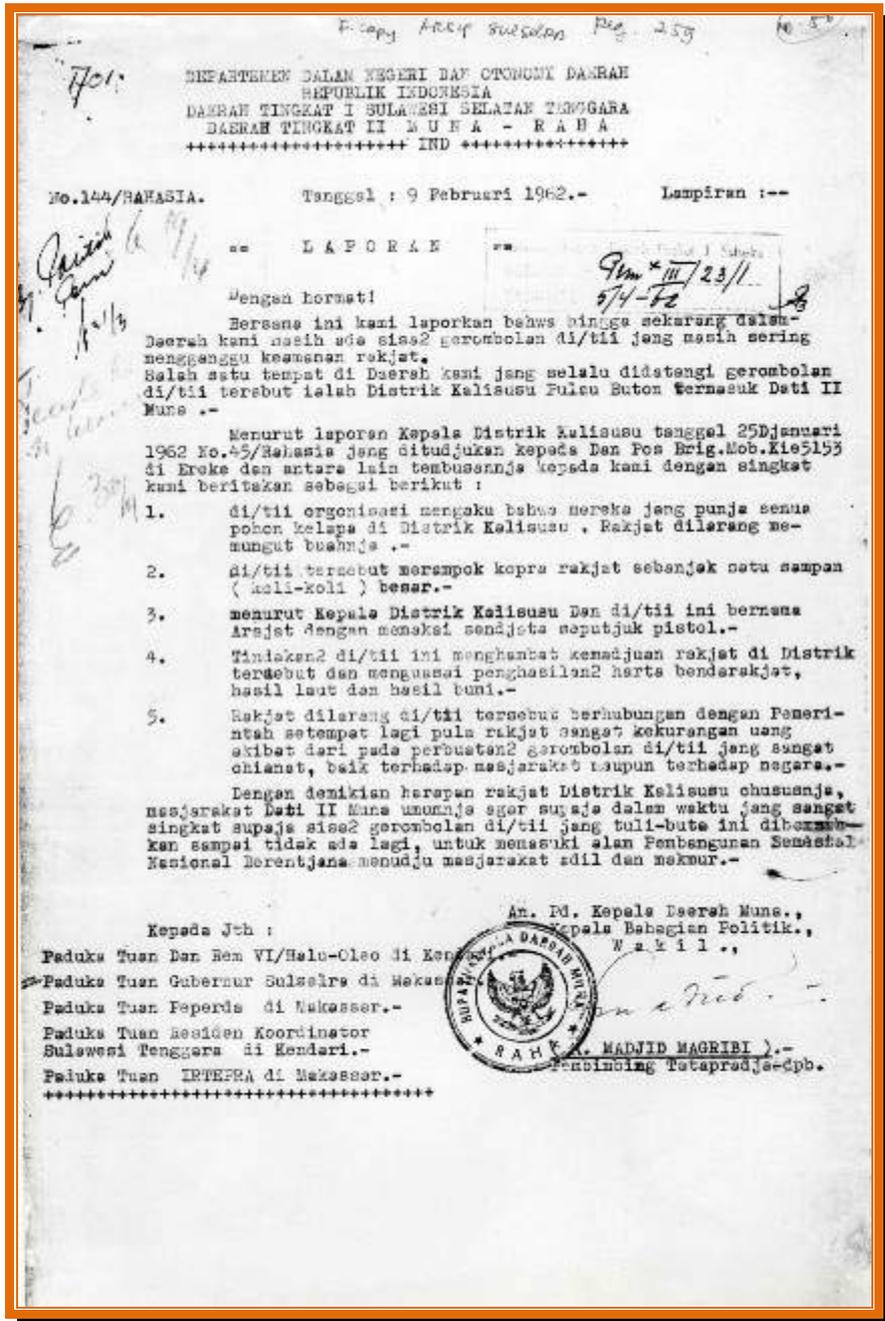
di Jakarta
di Makassar
di Makassar

TAMU BAHU
No. 10000

Surat Keputusan No. 029/Kpts/Peperda SST/60 tentang
Pembebasan/Pengangkatan Anggota Badan Koordinasi Kerja
Pembangunan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Panglima Daerah
Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang
Daerah untuk daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara,
18 Pebruari 1960

ANRI: M. Yamin 863

[Type text]



Laporan Kepala Daerah Tingkat II Muna tentang gangguan keamanan oleh gerombolan DI/TII, 9 Februari 1962.

KAD Sulsel: Arsip Pemda Sulselra No. 259

[Type text]

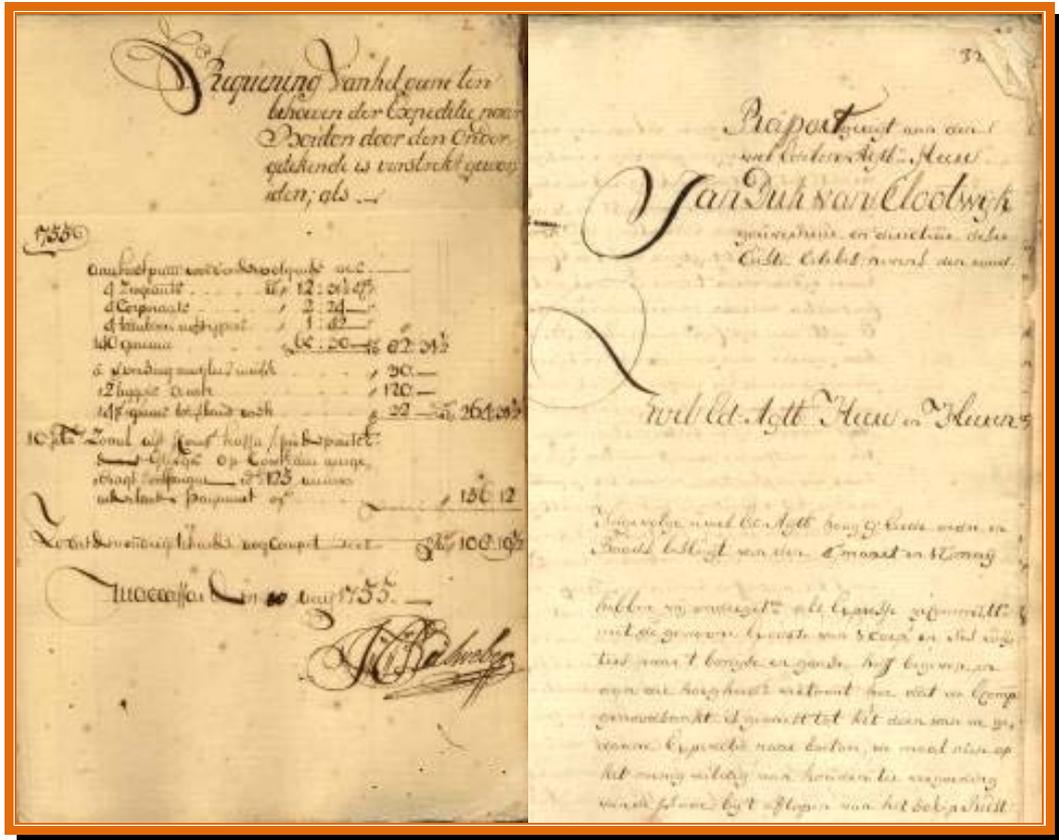


Konferensi pers di lapangan terbang Mandai Makasar dalam rangka perjalanan Menteri Keamanan Nasional/KSAD Jenderal A.H. Nasution ke Sulawesi Selatan/Tenggara pada tanggal 26 Maret sampai 30 Maret 1960

ANRI: Kempen 600330 RRI

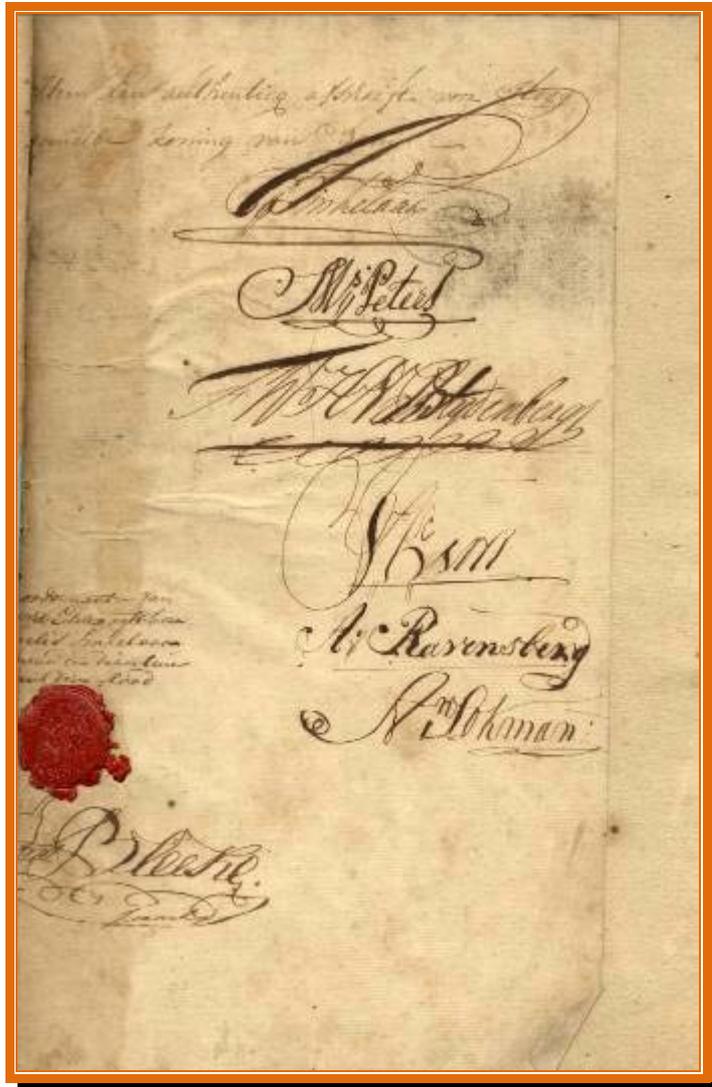
perekonomian

[Type text]



Laporan kepada Gubernur Sulawesi dan wilayah sekitarnya
 (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigh*) tentang ekspedisi
 kapal dagang "Rusten Werk" ke Boeton,
 13 Mei–20 Mei 1755.

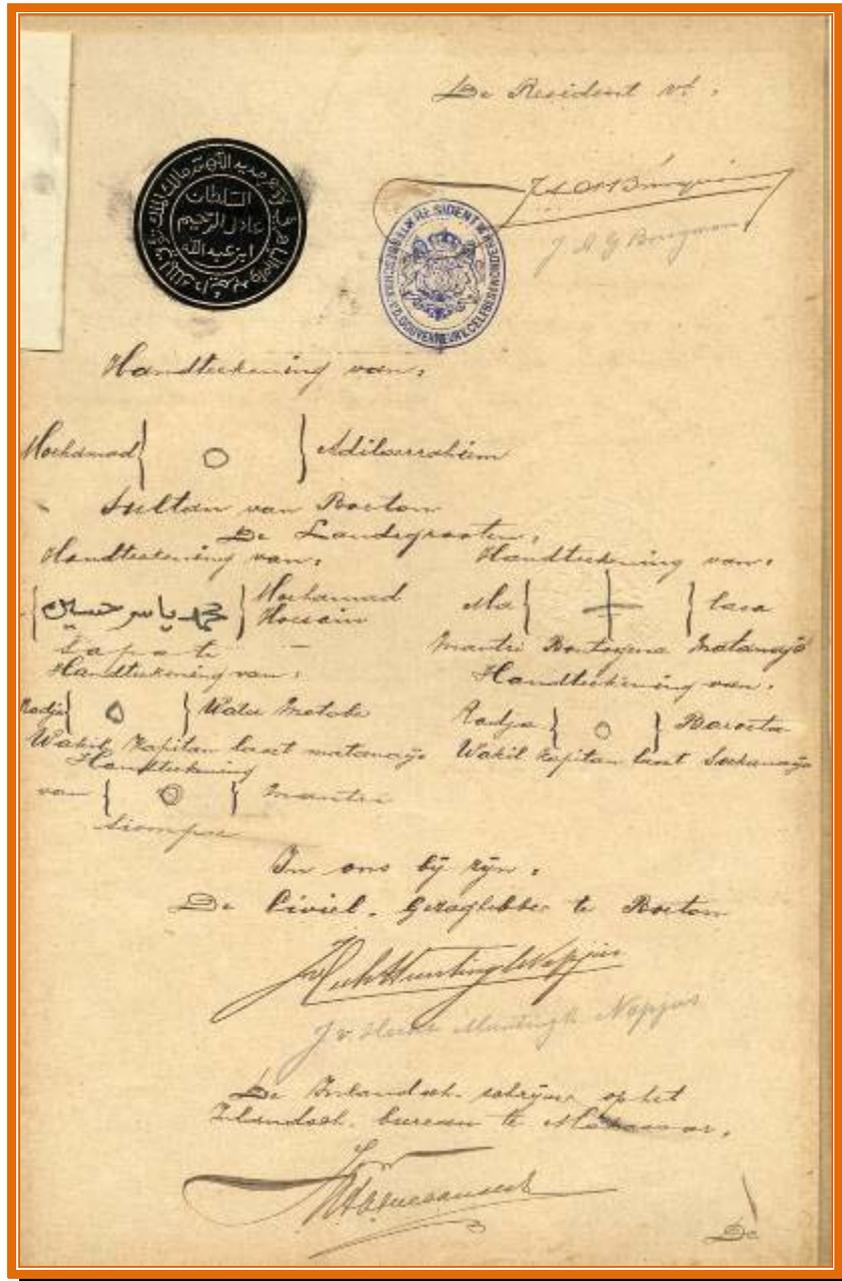
ANRI : Maccasser 73



Bagian akhir kontrak perjanjian persahabatan perdagangan
antara Sultan Boeton dengan VOC,
22 Maret 1766.

ANRI: Maccasser 374/10

[Type text]



Bagian akhir kontrak perjanjian antara J.A.G. Brugman *Resident Celebes* dan wilayah kekuasaannya dengan Moehamad Adiloerrahiem pelaksana pemerintahan Boeton tentang penyerahan ganti rugi penarikan pajak dan cukai barang-barang ekspor di Pelabuhan Buton, 24 September 1907.

ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 26 (Kontrak Celebes A/9)

[Type text]



Kuda sebagai alat transportasi dan perdagangan
untuk kalangan priyayi di wilayah Muna
± 1930

ANRI: KIT 317/72

[Type text]

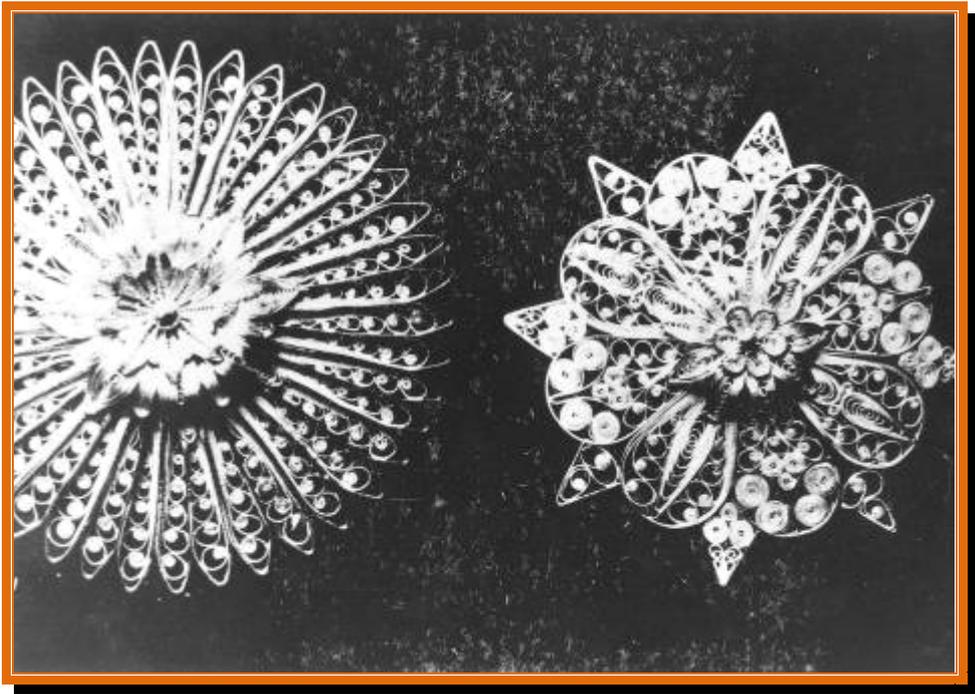


Perahu yang digunakan sebagai alat untuk pengiriman paket barang dagangan dari dan ke Buton, Sulawesi Tenggara.

± 1930

ANRI: KIT 540/25

[Type text]



Bros perak kerajinan masyarakat Kendari,
± 1930

ANRI: KIT 898/27



Peniti Radja dalam bentuk perhiasan bros dari perak
hasil kerajinan rakyat dari Kendari,
1948.

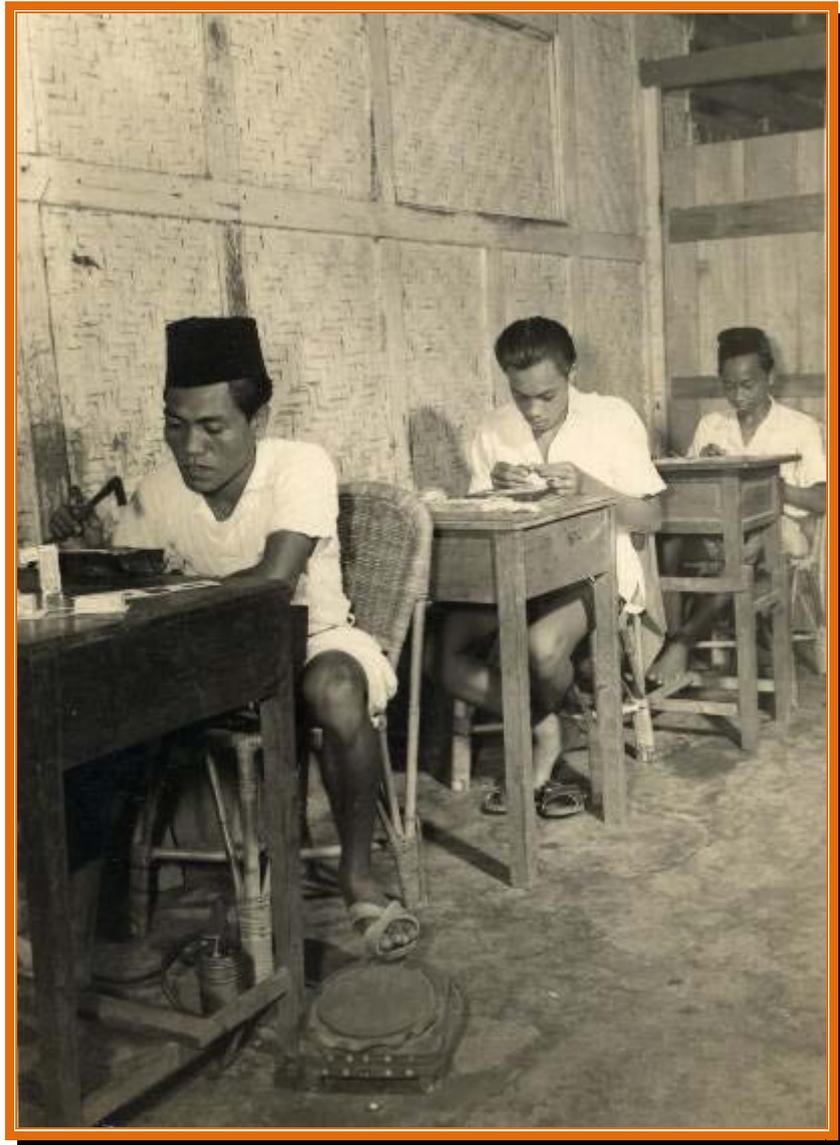
ANRI: RVD 80719 FG 1-1

[Type text]



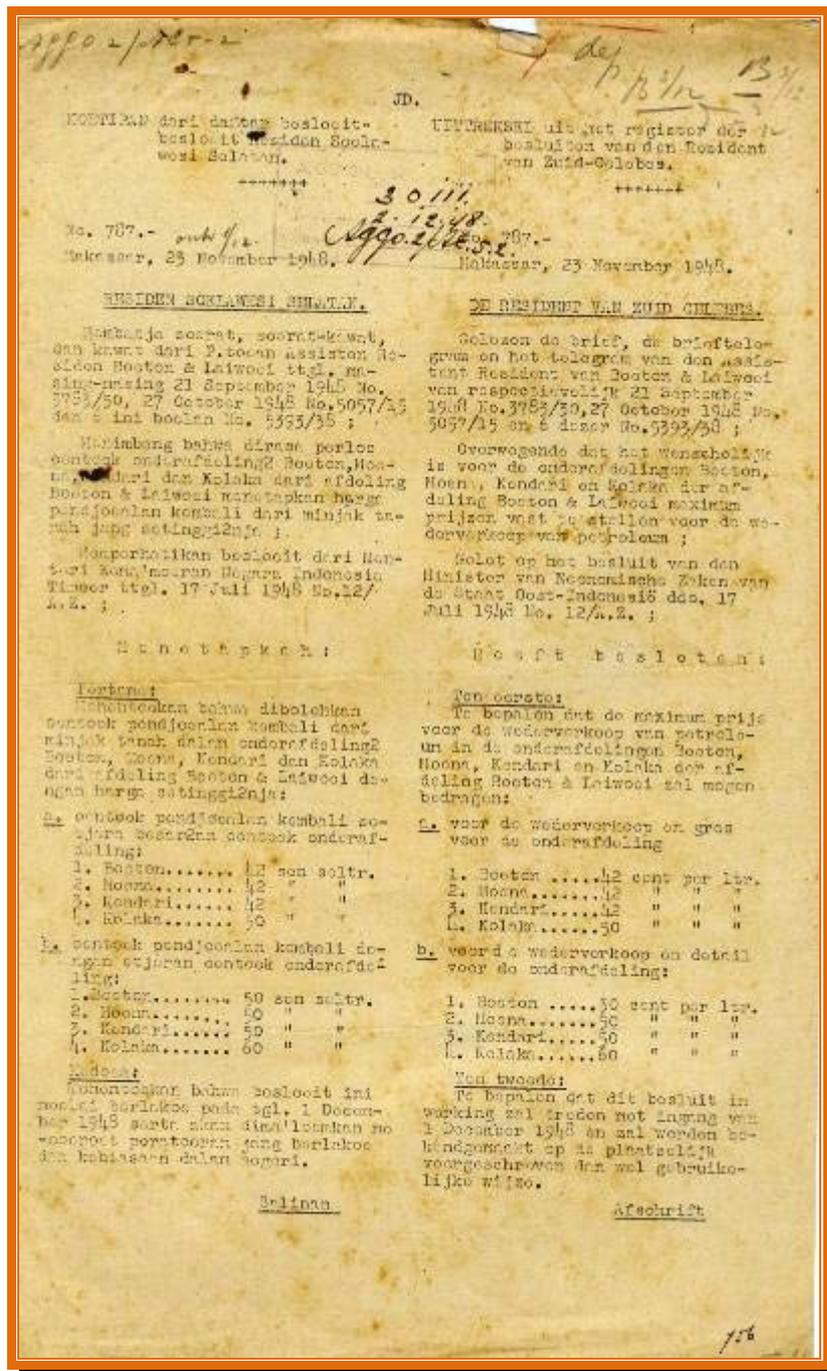
Berbagai bentuk perhiasan bros, giwang, gelang, tutup gelas,
dan peniti hasil kerajinan perak dari Kendari,
1948.

ANRI: RVD M.C. 32/4/1



Para pengrajin perak di Kendari sedang membuat berbagai jenis perhiasan dan kerajinan, 1948.

ANRI: RVD 80228 RR 2



Bagian awal kutipan Surat Keputusan Residen Sulawesi Selatan No. 787 tentang ketentuan penjualan kembali minyak tanah di wilayah Buton, Muna, Kendari dan Kolaka Afdeeling Buton dan Laiwei, 23 November 1948.

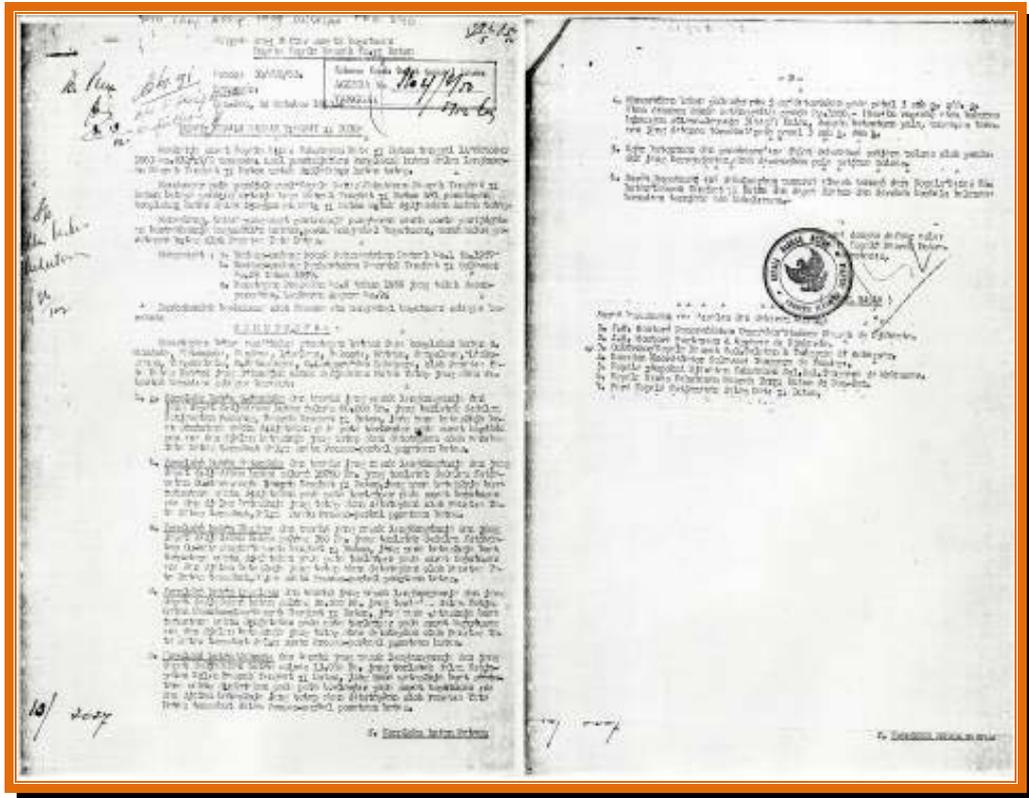
ANRI: Algemeene Secretarie 1356

[Type text]



Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro melakukan kunjungan ke Perusahaan Mutiara di Lalabusa (Bau-Bau) Sulawesi Tenggara
26 Maret 1953.

ANRI : Djapen M 8229



Kutipan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Buton
tentang usul penunjukan kompleks-kompleks kehutanan dalam
lingkungan Daerah Tingkat II Buton untuk dijadikan hutan tetap,
24 Oktober 1963.

KAD SULSEL: Arsip Pemda Sulselra 340

[Type text]

DINAS PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA
K E N D A R I

No. 1000/1000/1979

Nomor : 1000/1000/1979
 Tanggal : 20 Februari 1979
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Triwulan III
 (Amplop)

Kendari, 20 Februari 1979.

No. : 1000/1000/1979/01/00
 Proyek : Peningkatan Produksi Perkebunan di Sulawesi

Ditujukan kepada :

1. Direktur Jenderal Perkebunan
Jl. Terusan 11/1000 11 11/11
2. Ketua Daprasul-Sulawesi
Jl. Terusan 11/1000 11 11/11
3. Sekretaris Wakil Gubernur
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
4. Kepala Kantor Daprasul
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
5. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
6. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
7. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
8. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
9. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
10. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
11. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11

DINAS PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA
K E N D A R I

DINAS PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA

1000/1000/1979

DINAS PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA

K E N D A R I

No. 1000/1000/1979

Kendari, 20 Februari 1979.

No. : 1000/1000/1979/01/00
 Proyek : Peningkatan Produksi Perkebunan di Sulawesi

Ditujukan kepada :

1. Direktur Jenderal Perkebunan
Jl. Terusan 11/1000 11 11/11
2. Ketua Daprasul-Sulawesi
Jl. Terusan 11/1000 11 11/11
3. Sekretaris Wakil Gubernur
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
4. Kepala Kantor Daprasul
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
5. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
6. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
7. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
8. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
9. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
10. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11
11. Kepala Kantor Perkebunan
Jl. Aslaten 11/1000 11 11/11

DINAS PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA
K E N D A R I

DINAS PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA

1000/1000/1979

Laporan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
Kendari tentang laporan pelaksanaan Triwulan III, peningkatan
produksi perkebunan di Sulawesi Tenggara,
20 Pebruari 1979.

ANRI: Setwapres Adam Malik 543

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. Telp. No. 21310
- O T - K E N D A R I -

Kendari, 3 Oktober 1984

Kepada Yth.

Nomor : W15.02.KU.04.02-558/1984. Bapak Direktur Jenderal Pembinaan -
Lampiran : - Badan Peradilan Umum
Perihal : Laporan hasil pemeriksaan U. U. Sekretaris Direktorat Jenderal,
Anggaran Rutin tahun anggaran- di - J A K A R T A -
1983/1984 dan 1984/1985 pada -
Kantor-kantor Badan Peradilan
Umum di Propinsi Sulawesi Selat
tan / Tenggara. -

Memperhatikan surat Bapak tanggal 7 Agustus 1984 No. D1-PR.06-
10-35-1984 yo, surat Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman
tanggal 3 September 1984 No. S.FW.10.03-43 perihal tersebut pada pe-
kek surat diatas, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada -
kami, dengan hormat kami laporkan bahwa :

1. Perbuat Daftar Gaji pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengga-
ra telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan -
Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 29 September 1984 Nomor :
W15.02.KU.03.03-528/1984 ;
2. SPBU, Belanja Pegawai (Gaji dan lain-lain), telah dibukukan
secara bulat kedalam Buku Kas Umum sejak bulan Mei 1984 (ag-
susi pembuat Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal De-
partemen Kehakiman RI. tanggal 23 April 1984) ;

Demikianlah yang dapat kami laporkan kepada Bapak untuk dike-
tahui seperlunya. -

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,



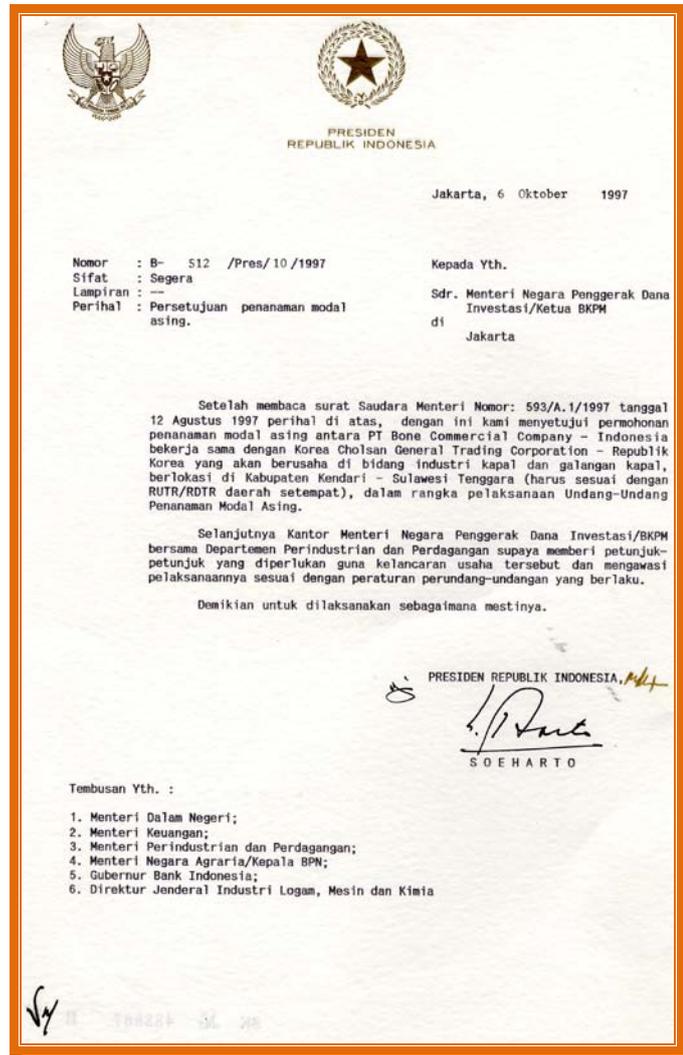
TRIMIRAN Kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Badan Peradilan Keuangan di - Jakarta ;
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman R.I. di Jakarta ;
3. Yth. Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
4. Yth. Bapak Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan di Jakarta ;
5. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI. di - Jakarta ;
6. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman RI. di - Jakarta ;
7. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Departemen Kehakiman RI. di - Jakarta ;
8. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan/
Tenggara di - Ujung Pandang.

3166/WJan/Bu

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
kepada Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan
tentang laporan hasil pemeriksaan Anggaran Rutin
tahun anggaran 1983/1984 dan 1984/1985 pada Kantor-kantor
Badan Peradilan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan/Tenggara,
3 Oktober 1984.

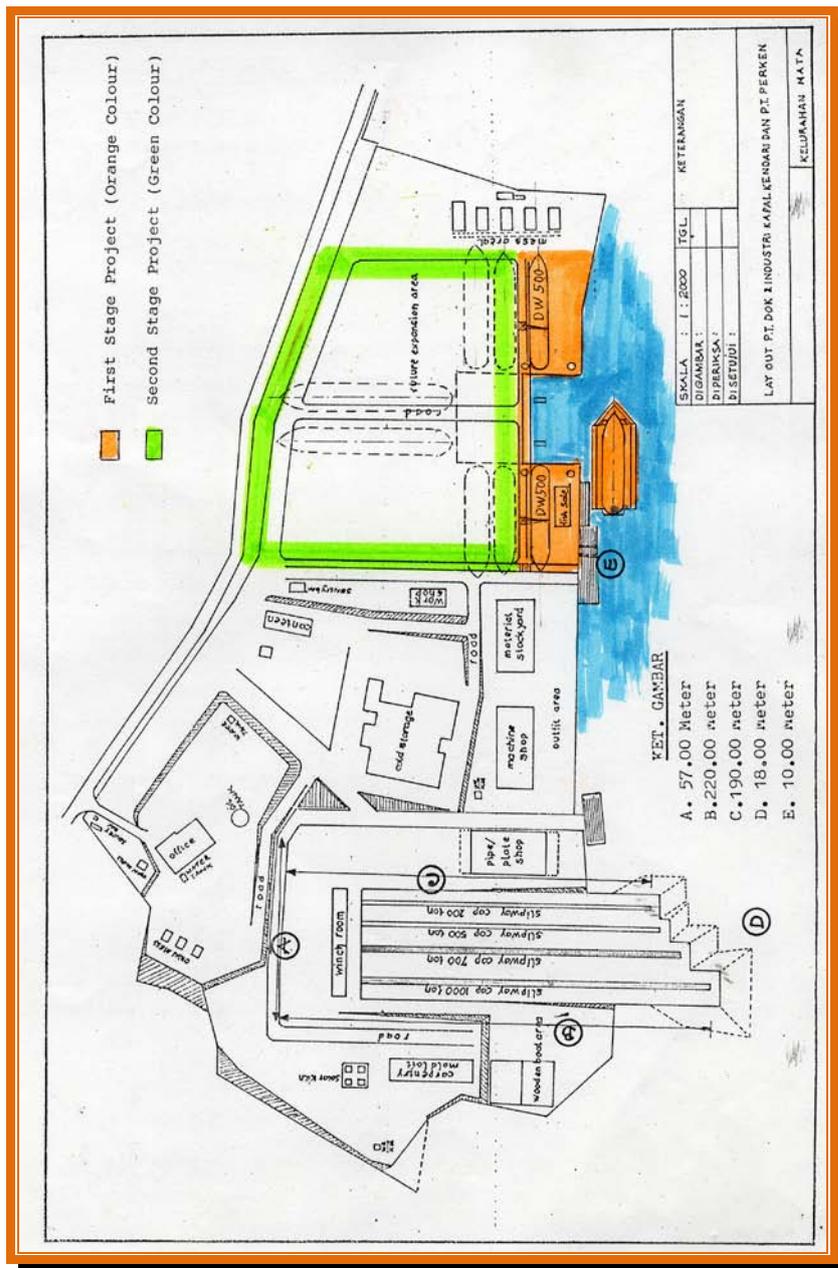
ANRI: Setwapres Umar Wirahadikusumah 699



Surat persetujuan Presiden Soeharto tentang Penanaman Modal Asing (PMA) antara PT Bone Commercial Company – Indonesia dengan Korea Cholsan General Trading Corporation Republik Korea di bidang Industri kapal dan galangan kapal di Kabupaten Kendari- Sulawesi Tenggara,
6 Oktober 1997

ANRI : Sekretariat Negara, Asisten Administrasi III No. 601

[Type text]



Sket proyek pertama dan kedua pembangunan industri kapal di Kendari, 1997

ANRI: Sekretariat Negara, Asisten Administrasi III No. 601

[Type text]

pertambahan

[Type text]



Para pekerja tambang aspal,
di Buton, Sulawesi Tenggara.

± 1930

ANRI: KIT 485/70

[Type text]



Para pekerja tambang aspal
sedang mengebor batuan di Buton,
± 1930

ANRI : KIT 485/64



Kapal pengeruk Buton dari Sawah Lunto dengan muatan aspal
dan batu kapur ke Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara,
 \pm 1930
ANRI: KIT 485/2



Tumpukan bahan dasar aspal alam di Buton, Sulawesi Tenggara,
 \pm 1930

ANRI: Kempen 65-10159

[Type text]



Pekerja Aspal dari Pasar Wajo mengisikan aspal
ke gerbong kereta, Sulawesi Tenggara,
± 1930

ANRI: KIT 485/76



Pemandangan alam di sekitar Pertambangan aspal Buton,
 \pm 1930

ANRI: Kempen 65-10157



Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara; Sudiro melakukan kunjungan ke Pertambangan Aspal di Pasar Wadjo (Bau-bau) 26 Maret 1953.

ANRI: Djapen M 8231



Pemandangan alam pada lokasi Proyek Aspal Buton, dengan
latar belakang laut dan pegunungan,
1965.

ANRI: Kempen 65-10098

[Type text]



Kunjungan Menteri Bina Marga Brigjen Hartawan Ke Sulawesi
untuk meninjau Tambang aspal (alam) di Buton,
1965

ANRI: Kempen 65-10138

sosial

[Type text]



Profil penduduk asli Mengkoko di wilayah Kolaka,
Sulawesi Tenggara pada masa sebelum kemerdekaan
Republik Indonesia

± 1930

ANRI: KIT 451/76

[Type text]

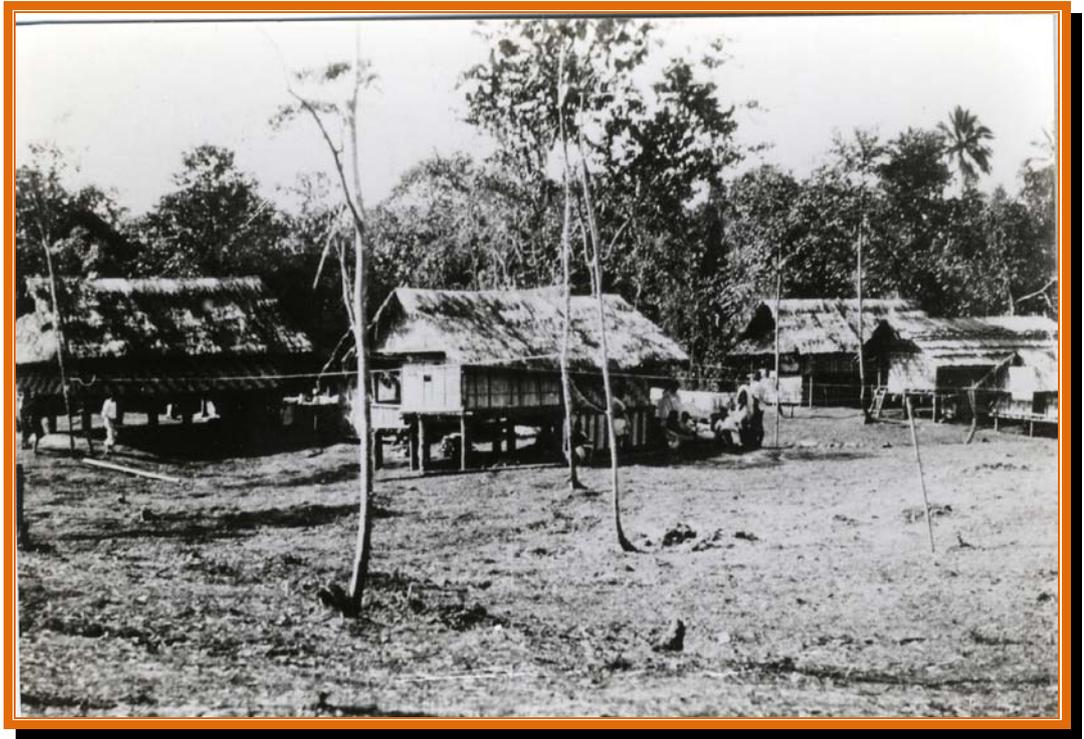


Profil penduduk asli Lanhoeli di wilayah Muna,
Sulawesi Tenggara

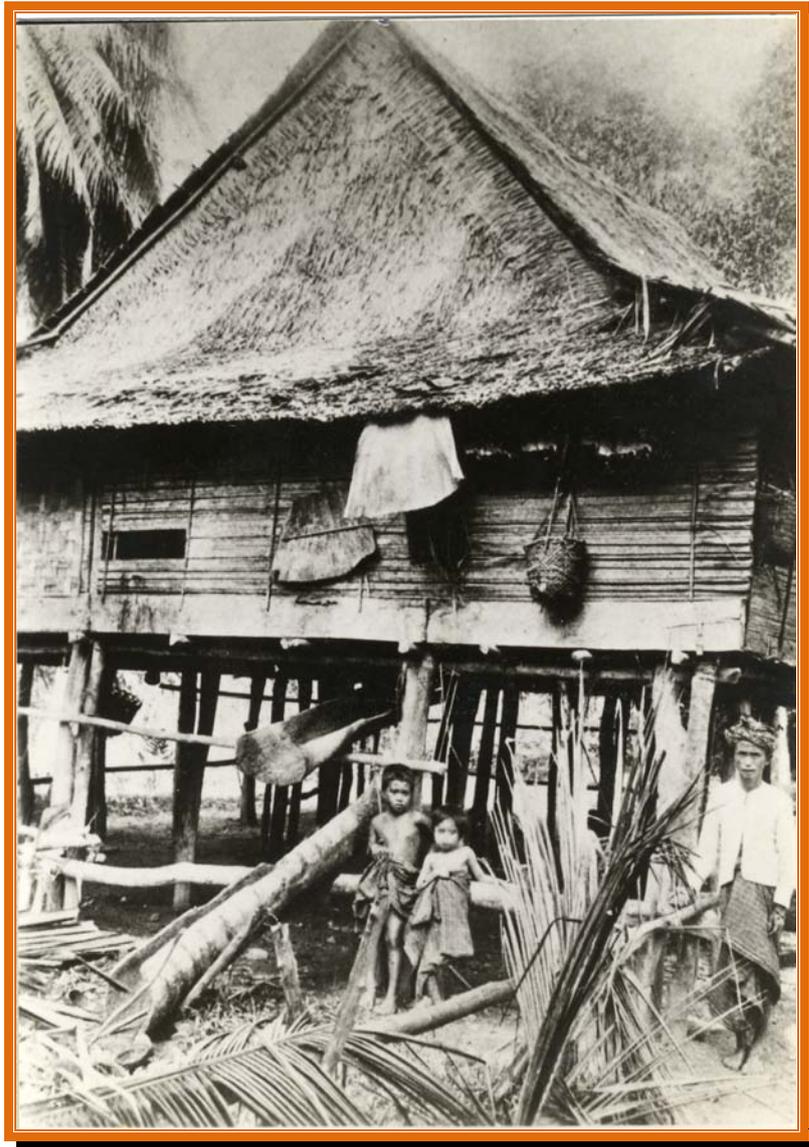
± 1930

ANRI: KIT 451/82

[Type text]



Rumah penduduk Blimi di wilayah Wariti, Buton,
Sulawesi Tenggara
± 1930
ANRI : KIT 485/54



Rumah penduduk Mengkala di wilayah Kolaka,
Sulawesi Tenggara

± 1930

ANRI: KIT 535/59



Kuburan Kayu di Kombe, Buton, Sulawesi Tenggara
± 1930

ANRI: KIT No.814/86



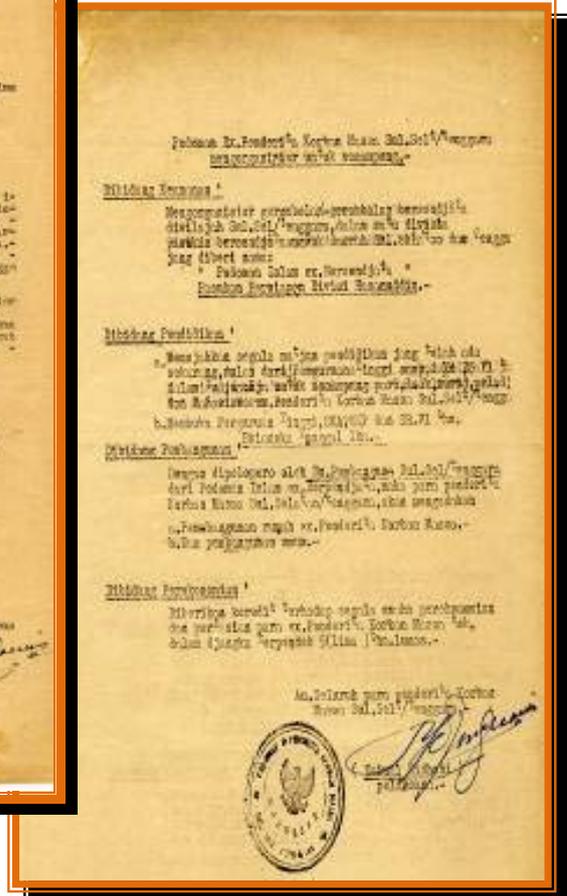
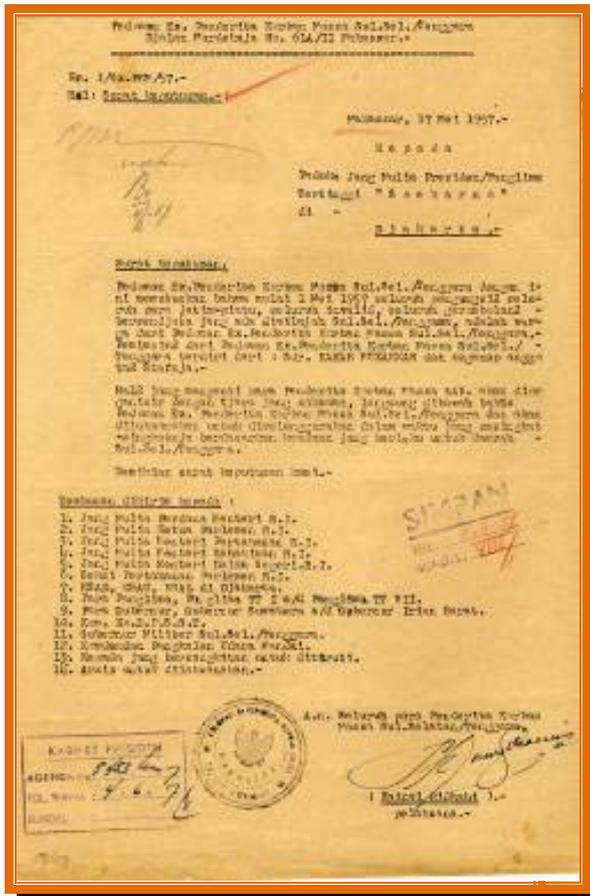
Gubernur Sulawesi Selatan-Tenggara, Sudiro melakukan kunjungan ke desa percobaan di Sulawesi Tenggara dalam rangkaian acara Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, 25 Maret 1953.

ANRI: Djapen M 8227



Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro
melakukan kunjungan ke Pulau Watji dan
berdialog dengan wakil-wakil masyarakat dalam
rangkaiian acara Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Sulawesi Tenggara,
25 Maret 1953.

ANRI: Djapen M 8234



Surat kepada Presiden Sukarno tentang surat keputusan pedoman Korban Massa Sulawesi Selatan Tenggara, 17 Mei 1957.

ANRI: Kabinet Presiden 818

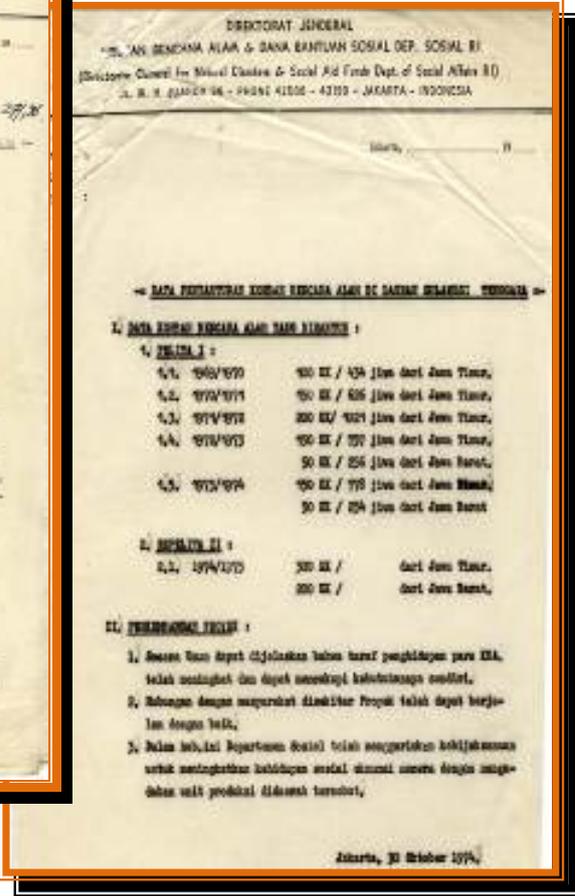
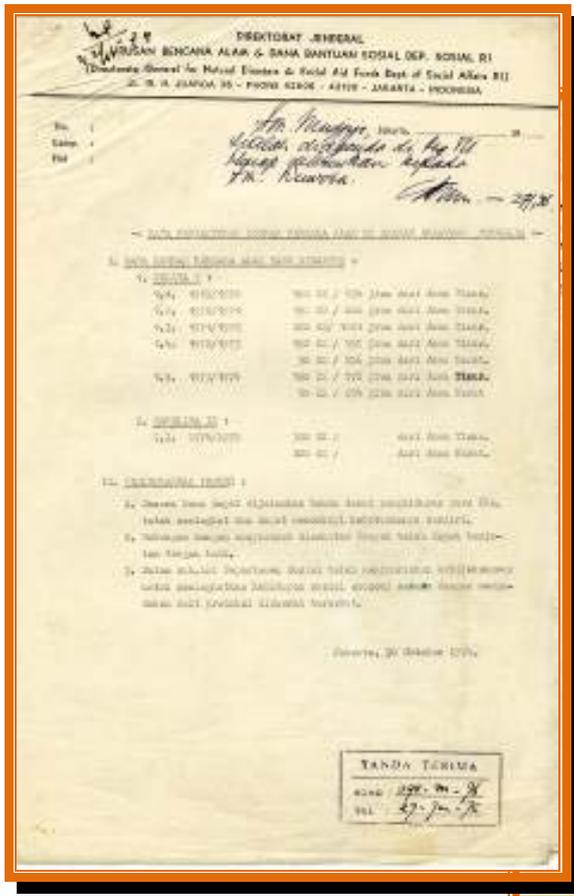
[Type text]



Kontingen Daerah Tingkat II Muna sedang berpawai
pada acara Pembukaan Pekan Olah Raga Daerah ke-III
Se-Sulawesi Selatan Tenggara di Pare-pare,
29 Oktober 1960.

ANRI: Djapen M 16030

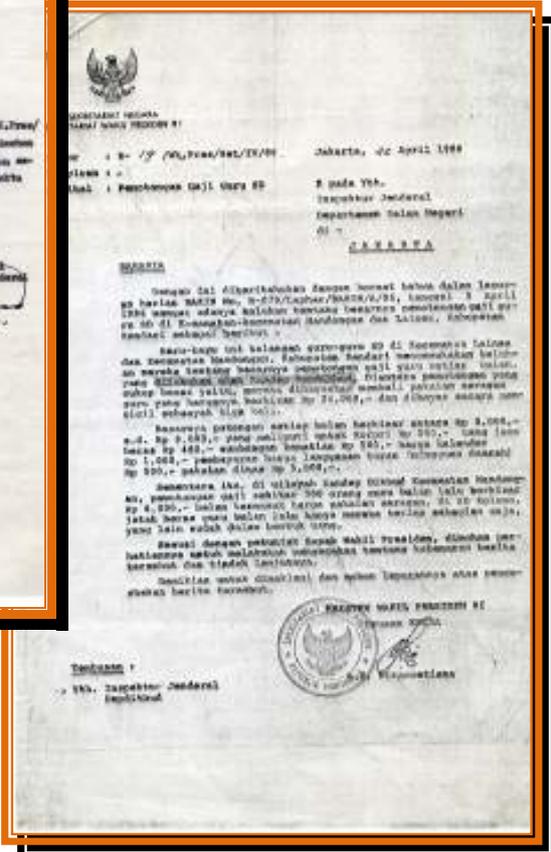
[Type text]



Surat Direktur Jendral Urusan Bencana Alam dan Dana Sosial Departemen Sosial RI tentang data penyantunan korban bencana alam di daerah Sulawesi Tenggara, 30 Oktober 1974.

ANRI: Setwapres Sri Sultan Hamengkubuwono 658

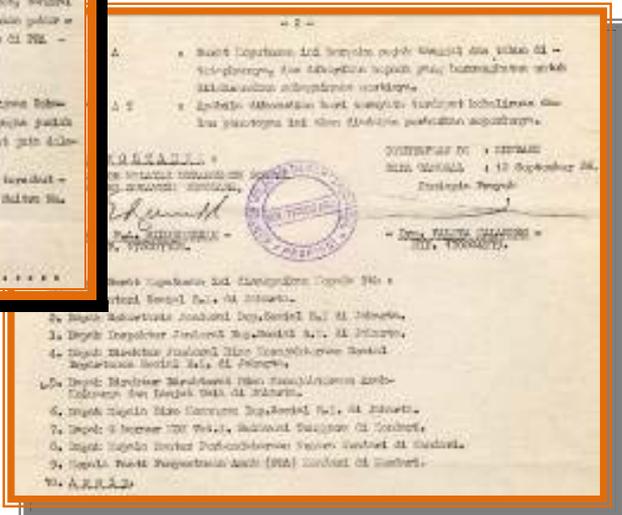
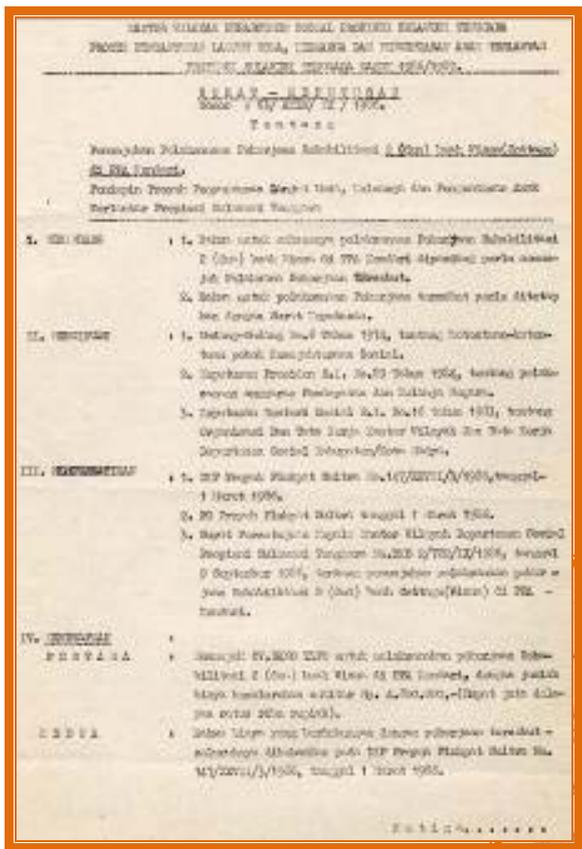
[Type text]



Laporan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Asisten Wakil Presiden RI tentang permasalahan pemotongan gaji guru SD di daerah Sulawesi Tenggara, 3 Mei 1986.

ANRI: Setwapres Umar Wirahadikusumah 730

[Type text]



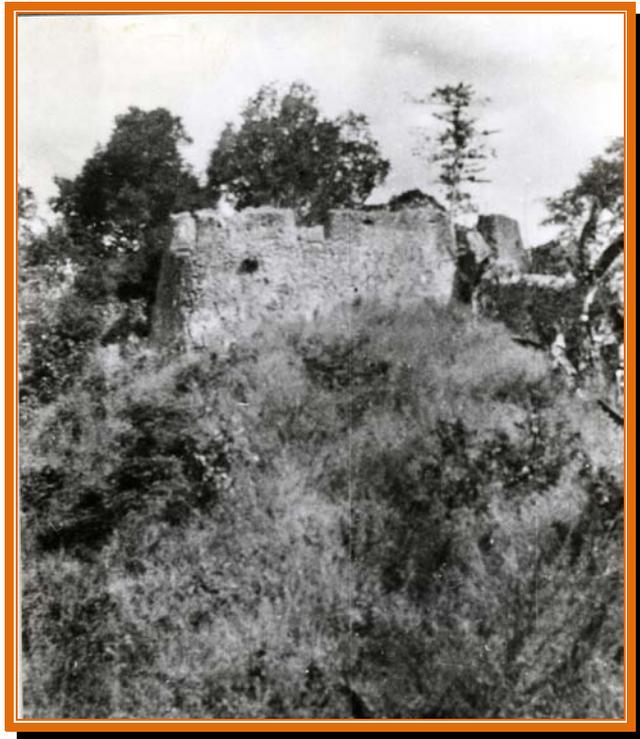
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara No. 63/AKLU/IX/1986 tentang penunjukan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) buah wisma di Panti Penampungan Anak (PPA) Kendari, 12 September 1986.

ANRI: Setwapres Umar Wirahadikusumah 509

[Type text]

kebudayaan dan pariwisata

[Type text]



Reruntuhan Benteng Bastion dari Keraton Baliol Buton yang
dibuat tahun 1631 pada masa pemerintahan VOC (*Vereniging
Oostindische Compagnie*),

± 1930

ANRI: KIT 338/82 dan KIT 338/84

[Type text]



Perahu "Radjah's" di perairan Pantai Kendari,
± 1930
ANRI: NIGIS 50 – 78

[Type text]



Perahu Tradisional di perairan Pantai Kendari,
± 1930

ANRI: NIGIS 50 – 79

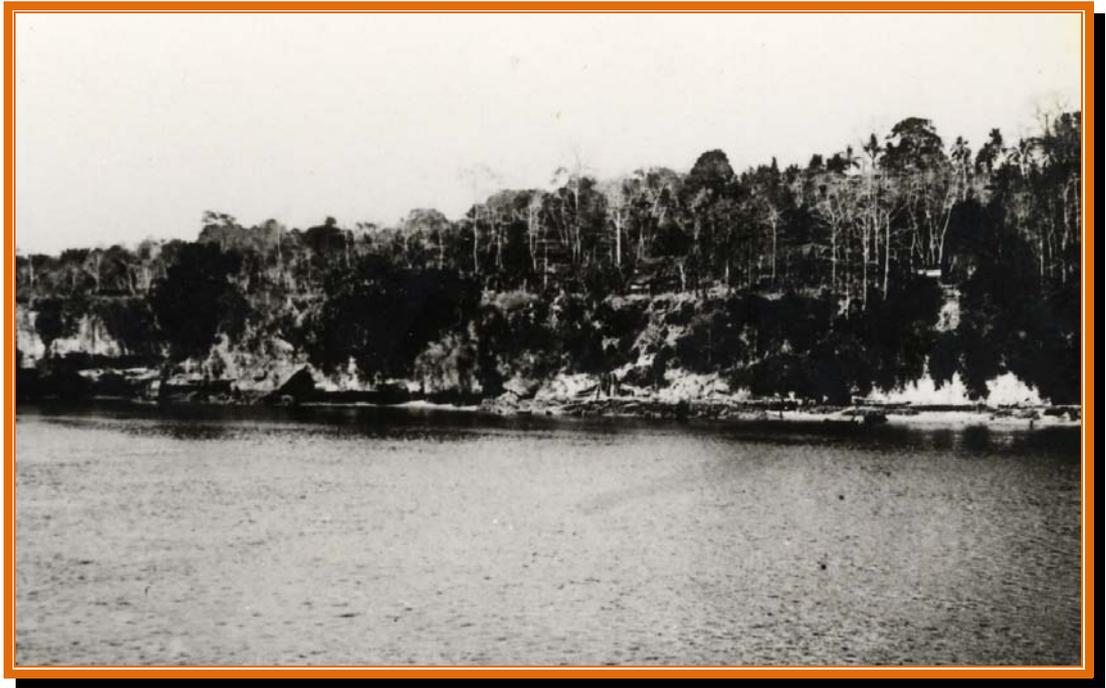
[Type text]



Jembatan dari pohon kelapa sebagai alat penyeberangan
penduduk dari Ogena ke Wariti, Buton, Sulawesi Tenggara
± 1930

ANRI: KIT 485/56

[Type text]



Pemandangan pantai Binangka di Buton

± 1930

ANRI : KIT 946/9

[Type text]



Sultan Buton, La Ode Falihi (ke tiga dari kiri dengan mahkota kerajaan) dengan Raja Goa, Andi Idjo Karaeng Lalolang dan Raja Bone, Aroempone Andi Panbenteng sebagai pimpinan adat terpenting pada upacara pelantikan Hadat Tinggi Sulawesi Selatan di Makasar, 12 November 1948.

ANRI: RVD 81112 RR 4



Pelantikan Hadat Tinggi di Makassar.

Anggota Hadat Tinggi: Paeng Makale Andi Lolo, Aroe Maloesetasi dari Pare-pare, Raja Goa Andi Idjo Karaeng Lalolang, Arempone Andi Pabenteng Dg.Palawa (dibelakang), Sapati Lai Woei Rongga, Aroe (dibelakang) Pabicara Banggae (Majene), Kanbo Karaeng Gantarang (Boeloekoemba), Abd. Gani (dibelakang) Soelaewatan Sawito (Pinrang), Andi Tjalo, Opoe Patoeroe (Loewoe) Andi Ibrahim, Aroe Malolo Binoeang La Maga,

12 Nopember 1948,

ANRI: RVD M 2522



Maket rumah adat di daerah Buton,
1957.

ANRI: Kempen 571006 RR3-11



Permainan alat musik bamboo oleh anak sekolah pada penyambutan Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI) Mr. Sartono di Kendari, 19 Juni 1959.

ANRI: Kempen 590619 RR 10 dan RR 11



Tempat pembuatan perahu di Buton, Sulawesi Tenggara,
tampak para pengrajin memperagakan cara membuat perahu,
8 Agustus 1961.

ANRI: Djapen M. 18272



Pelepasan perahu dari hasil kerajinan rakyat
di Sulawesi Tenggara,
8 Agustus 1961.

ANRI: Djapen M 16283



Dua orang sedang memperagakan tarian adat dalam penyambutan Menteri Bina Marga, Brigjen Hartawan ke Buton, Sulawesi Tenggara 1965.

ANRI: Kempen 65-10057

[Type text]



Tari-tarian adat Buton oleh para wanita dalam saat penyambutan Menteri Bina Marga, Brigjen Hartawan ke Buton, Sulawesi Tenggara 1965.

ANRI: Kempen 65-10078

[Type text]

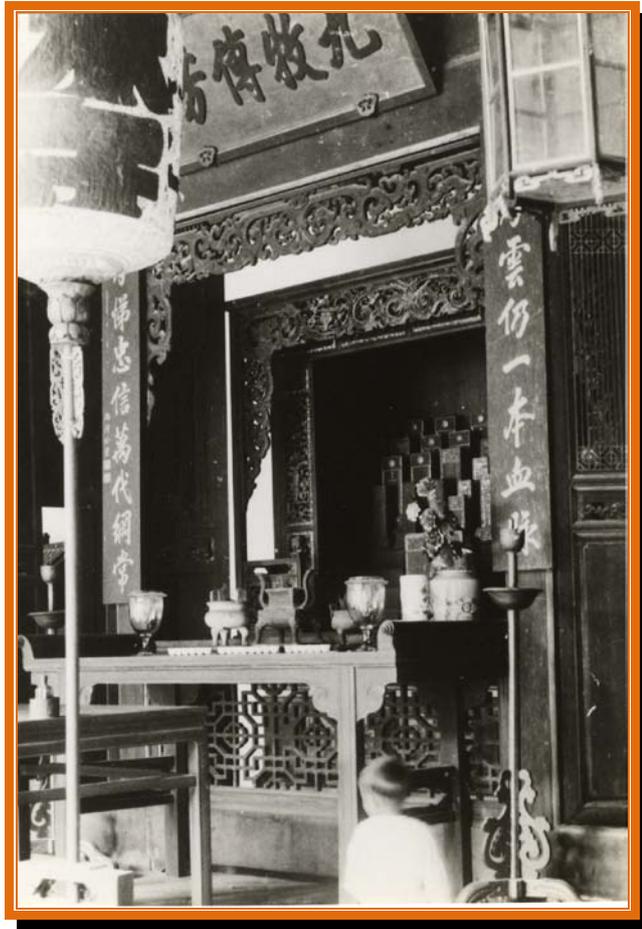


Tari kipas adat Buton dalam penyambutan Menteri Bina Marga,
Brigjen Hartawan ke Buton, Sulawesi Tenggara
1965.

ANRI: Kempen 65-10081

keagamaan

[Type text]



Altar sembahyang penganut Konghucu di Kelenteng,
Kendari, Sulawesi Tenggara

± 1930

ANRI : KIT 792/81



Rumah missi penyebar agama Kristen "Langgoer" yang juga
dijadikan sebagai tempat ibadat agama kristen di Kendari
± 1930

ANRI: KIT 810/46

[Type text]



Gereja Roma Katholik "Langgoer", Kendari,
± 1930
ANRI: KIT 810/44

[Type text]



Konferensi Alim Ulama se-Sulawesi
hadir pula utusan alim ulama dari Sulawesi Tenggara,
12 Mei 1960

ANRI: Djapen M 15884

[Type text]

daftar arsip

[Type text]

GEOGRAFI

1. Peta Kepulauan Teokang Besi, Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Pulau Binongko, Tomia-Tongnarao Kali Doepa, Wangi-wangi-Wanji, 1941.
ANRI: 2507/139
2. Peta Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, 1941.
ANRI: 2543/Blad 82.83/XXXIV – XXXV
3. Peta Pulau Boeton, (Buton) Sulawesi Tenggara ,1943.
ANRI: 2506/Sheet No. 1/138
4. Peta Lasalimoe, Sulawesi Tenggara, 1946.
ANRI: 87/SB 51 ME/5 Sulawesi Tenggara
5. Peta Pulau Ilitalo, Sulawesi Tenggara, 1946.
ANRI: 88/SB 51 SE/5
6. Peta Provinsi Sulawesi Tenggara, 2003.
ANRI: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

7. Intisari Keputusan *Comissie Admiraal* Cornelis Speelman tentang penjelasan dan konfirmasi kontrak perjanjian antara Sultan Buton Losimbotto dan Paduka Sri Sultan Mandarsaba Sultan Ternate mengenai perdagangan, tempat tinggal penduduk, padi dan beras, 25 Juni 1667.
ANRI: Makassar 275 / 2

8. Penjelasan pasal 16 pada kontrak perjanjian antara Paduka Sri Sultan Hasannudin Sultan Makassar dengan Cornelis Speelman tentang ganti rugi dan pengembalian pasukan kepada Sultan Buton akibat penyerangan tiba-tiba oleh Kesultanan Makassar, 18 November 1667.
ANRI: Makassar 275/2
9. Kontrak Perjanjian antara Kerajaan Boeton, Sultan Asararoedini dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang perpanjangan kontrak pengakuan kedaulatan pengangkatan Sultan Asararoedini sebagai penguasa tertinggi yang di wilayah Buton dan sekitarnya, Januari 1804.
ANRI: Makassar 375/48
10. Akte Persetujuan Mohamad Saleh atas nama Sultan Buton Kayanoeddin III yang telah wafat pada 16 Juni 1886 tentang penguasaan wilayah Buton kepada Kayamoeddin IV sebagai Sultan Sapati dengan nama Mohamad Oemar, 20 Mei 1888.
ANRI: Bt. 20 Mei 1888 No. 11 (Kontrak Celebes A/9)
11. Kontrak Perjanjian Tertutup antara Gubernur Jenderal dengan Moehamad Adiloerrahiem Sultan Buton tentang pembagian wilayah Buton, 8 April 1906.
ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 25 (Kontrak Celebes A/9)
12. Lampiran A kontrak tertutup tanggal 8 April 1906 mengenai penjelasan daerah-daerah yang termasuk wilayah Buton.
ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 25 (Kontrak Celebes A/9)

13. Lampiran kontrak tertutup tanggal 8 April 1906 mengenai penjelasan pasal 13 yang berhubungan dengan pembagian wilayah Pelabuhan Buton atau Bolio, 8 April 1906.
ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 25 (Kontrak Celebes A/9)
14. Salinan akte persetujuan pemilihan Moehamad Adiloerrahiem sebagai Sultan Buton menggantikan Mohamad Oemar Kaijamoeddin IV yang telah wafat, 8 April 1906.
ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 25 (Kontrak Celebes A/9)
15. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 19 Tahun 1911 tentang pembagian wilayah *Celebes* (Sulawesi) dan wilayah-wilayah dibawah kekuasaannya menjadi 7 (tujuh) wilayah bagian/*afdeeling*, dimana dahulu Buton menjadi ibukota *Afdeeling* Sulawesi Timur, 15 November 1911.
ANRI: Bt. 15 November 1911 No. 19
16. Menteri pertama Kesultanan Boeton, 1913.
ANRI: KIT 326/4
17. Surat Kepada Kementerian Dalam Negeri dari Direktur Kabinet Presiden tentang perubahan bentuk pemerintahan di Buton, Bau- Bau (*Celebes* Selatan), dari Swapraja Buton yang dikepalai Sultan menjadi Dewan Daerah Buton yang dikepalai oleh Kepala Dewan Daerah, 6 Maret 1951.
ANRI: Kabinet Presiden 830

18. Surat Swapraja Buton Sultan Buton, La Ode Falihi kepada Presiden RI tentang permohonan rakyat Buton agar hak dan kewajiban Sultan sebagai khalifatullah tetap diakui oleh Pemerintah RI, 23 Agustus 1952.
ANRI: Kabinet Presiden 851
19. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro pada upacara penyambutan di Bau-bau, Buton dalam rangka menghadiri Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, 24 Maret 1953.
ANRI: Djapen M 8217
20. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro berpidato dalam upacara Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, 24 Maret 1953.
ANRI: Djapen M 8222
21. Pemeriksaan barisan kehormatan oleh Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Mr. Sartono di lapangan terbang Kendari dalam rangka kunjungan Presiden ke Sulawesi Tenggara, 19 Juni 1959.
ANRI: Kempen 590619 RR 4
22. Aubade oleh anak-anak sekolah di Kendari untuk menyambut Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Mr. Sartono pada kunjungan Presiden ke Sulawesi Tenggara, 19 Juni 1959.
ANRI: Kempen 590619 RR 7
23. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, 4 Juli 1959.
ANRI: Sekretariat Kabinet UU Darurat 316

24. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (DNOD), Ipiq Gandamana membacakan sumpah pada Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara dari Andi Pangerang kepada H. Andi Rivai, 20 April 1960.
ANRI: Djapen M 15836
25. Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara yang baru dilantik H. Andi Rivai pada Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara dari Andi Pangerang kepada H. Andi Rivai, 20 April 1960.
ANRI: Djapen M 15845
26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah, 13 Desember 1960.
ANRI: Sekretariat Kabinet Perpu 77
27. Notulen rapat Dewan Pengurus Partai Nasional Indonesia (PNI) Kolaka, Sulawesi Tenggara, 8 Oktober 1962.
KAD SULSEL: Arsip Pemda Sulselra 42
28. Kunjungan Menteri Bina Marga Brigjen Hartawan ke Buton, tampak Bapak Menteri berkalung bunga sedang melambaikan tangan, 23 Agustus 1965.
ANRI: Kempen 65-10063
29. Sambutan Masyarakat Buton pada Menteri Bina Marga Brigjen Hartawan, 23 Agustus 1965.
ANRI: Kempen 65-10077

30. Menteri Bina Marga Brigjen Hartawan sedang memberikan sambutan pada masyarakat Buton, 23 Agustus 1965.
ANRI: Kempen 65-10079
31. Pidato Presiden Soekarno pada peringatan Hari Pahlawan dan Pemberian Tanda Jasa Bintang Maha Putra III kepada Almarhum Robert Wolter Monginsidi di Istana Negara, Jakarta 10 Nopember 1965.
ANRI: Pidato Presiden 822.
32. Surat Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet RI, Bambang Kesowo kepada Sekretaris Wakil Presiden, Umar Wirahadikusuma tentang Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1986 mengenai Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Daerah TK II Kendari, TK II Kolaka, TK II Muna dan TK II Buton dalam Wilayah Provinsi TK I Sulawesi Tenggara, 19 Desember 1986.
ANRI: Setwapres Umar Wirahadikusumah 641
33. Surat dari Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari tentang dukungan penataan kawasan pusat Pemerintahan Tingkat I Sulawesi Tenggara, 30 Desember 1998.
ANRI: Badan Pertanahan Nasional 539
34. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Kendari tentang Hasil pemeriksaan reguler di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, 12 Desember 1999.
ANRI: Menteri Koordinator Bidang Pengawasan dan Pembangunan 173

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

35. Kontrak perjanjian tambahan antara Daniel Francois van Braam Morris Ridder dengan Mohamad Omar Kaijamoeddin IV Sultan Buton tentang hukum pidana, pelanggaran dan pengurangan hukuman, bertalian dengan garis telegraf dan kabel yang terletak di dalam dan luar wilayah Buton, 18 Juli 1887.
ANRI: Bt 13 Mei 1889 No. 2 (Kontrak Makasar A/9)
36. Kontrak tambahan antara Johan Albert Goerge Boeegeman Assiten Resident Celebes dan wilayah kekuasaannya dengan Mohamad Oemar Kayamoeddin IV Sultan Buton tentang larangan ekspor import senjata, amunisi dan keperluan perang di wilayah Buton, 23 April 1890.
ANRI: Bt 23 April 1890 No. 28 (Kontrak Celebes A/9)
37. Korespondensi antara Gubernur Sulawesi dan wilayah sekitarnya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigh*) dengan Direktur Perhubungan dan Pekerjaan Umum (*De Directeur van Verkeer en Waterstaat*) tentang pembangunan lapangan terbang militer di Buton, 3 Juli – 22 Desember 1937.
ANRI: BOW No. BL 96
38. Telegram dari Gabungan Partai-partai Politik di Makassar kepada Delegasi Indonesi di Batavia tentang desakan pembatalan hukuman mati terhadap Wolter Monginsidi, 4 September 1949.
ANRI: Delegasi Indonesia 1019
39. Serah terima jabatan Panglima Komando Daerah Militer Angkatan Darat Sulawesi Selatan Tenggara dari Kolonel Mattalata kepada Letnan Kolonel A.M. Jusuf Amir, 6 November 1959.
ANRI: Djapen M 15619

40. Surat Keputusan No. 029/Kpts/Peperda SST/60 tentang pembebasan/pengangkatan anggota Badan Koordinasi Kerja Pembangunan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Panglima Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku penguasa perang daerah untuk daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, 18 Pebruari 1960.
ANRI: M. Yamin 863
41. Laporan Kepala Daerah Tingkat II Muna tentang gangguan keamanan oleh gerombolan Darul Islam /Tentara Islam Indonesia (DI/TII), 9 Februari 1962.
KAD SULSEL: Arsip Pemda Sulselra No. 259
42. Konferensi pers di lapangan terbang Mandai, Makasar dalam rangka perjalanan Menteri Keamanan Nasional/ Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution ke Sulawesi Selatan/Tenggara pada tanggal 26 Maret sampai 30 Maret 1960.
ANRI: Kempen 600330 RRI

PEREKONOMIAN

43. Laporan kepada Gubernur Sulawesi dan wilayah sekitarnya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigh*) tentang ekspedisi kapal dagang "*Rusten Werk*" ke Buton, 13 Mei–20 Mei 1755.
ANRI: Maccasser 73
44. Bagian akhir dari Kontrak Perjanjian persahabatan perdagangan antara Sultan Boeton dengan VOC, 22 Maret 1766.
ANRI: Maccasser 374/10

45. Bagian akhir dari kontrak perjanjian antara J.A.G. Brugman *Resident Celebes* dan wilayah kekuasaannya dengan Moehamad Adiloerrahiem pelaksana pemerintahan Buton tentang penyerahan ganti rugi penarikan pajak dan cukai barang-barang ekspor di Pelabuhan Buton, 24 September 1907.
ANRI: Bt. 25 Januari 1907 No. 26 (Kontrak Celebes A/9)
46. Kuda sebagai alat transportasi dan perdagangan untuk kalangan priyayi di wilayah Muna, ± 1930.
ANRI: KIT 317/72
47. Perahu yang digunakan sebagai alat untuk pengiriman paket dagangan dari dan ke Buton, ± 1930.
ANRI: KIT 540/25
48. Bros perak kerajinan masyarakat Kendari, ± 1930.
ANRI: KIT 898/27
49. Peniti Radja dalam bentuk perhiasan bros dari perak hasil kerajinan rakyat dari Kendari, 1948.
ANRI: RVD 80719 FG 1-1
50. Berbagai bentuk perhiasan bros, giwang, gelang, tutup gelas, dan peniti hasil kerajinan perak dari Kendari, 1948.
ANRI: RVD M.C. 32/4/1
51. Para pengerajin perak di Kendari sedang membuat berbagai jenis perhiasan dan kerajinan dari perak, 1948.
ANRI: RVD 80228 RR 2

52. Bagian awal dari kutipan Surat Keputusan Residen Sulawesi Selatan Nomor 787 Tahun 1948 tentang ketentuan penjualan kembali minyak tanah di wilayah Buton, Muna, Kendari dan Kolaka *Afdeeling* Butoen dan Laiwei, 23 November 1948.
ANRI: Algemeene Secretarie 1356
53. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro melakukan kunjungan ke Perusahaan Mutiara di Lalabusa (Bau-Bau) dalam rangkaian acara Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, 26 Maret 1953.
ANRI: Djapen M 8229
54. Kutipan surat-surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Buton tentang usul penunjukkan kompleks-kompleks kehutanan dalam lingkungan Daerah Tingkat II Buton untuk dijadikan hutan tetap, 24 Oktober 1963.
KAD SULSEL: Arsip Pemda Sulselra 340
55. Laporan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Kendari tentang laporan pelaksanaan Triwulan III, peningkatan produksi perkebunan di Sulawesi Tenggara, 20 Pebruari 1979.
ANRI: Setwapres Adam Malik 543
56. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan tentang laporan hasil pemeriksaan Anggaran Rutin tahun anggaran 1983/1984 dan 1984/1985 pada Kantor-kantor Badan Peradilan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan/Tenggara, 3 Oktober 1984.
ANRI: Setwapres Umar Wirahadikusumah 699

57. Surat persetujuan dari Presiden Soeharto tentang Penanaman Modal Asing (PMA) antara PT. Bone Commercial Company – Indonesia dengan Korea Cholsan General Trading Corporation Republik Korea di bidang Industri kapal dan galangan kapal di Kabupaten Kendari – Sulawesi Tenggara, 6 Oktober 1997
ANRI: Sekretariat Negara Asistem Administrasi III No. 601
58. Sket proyek pertama dan kedua pembangunan industri kapal di Kendari, 1997
ANRI: Sekretariat Negara, Asisten Administrasi III No. 601

PERTAMBANGAN

59. Para pekerja tambang aspal, di Buton, ± 1930.
ANRI: KIT 485/70
60. Para pekerja tambang aspal, sedang mengebor batuan di Buton, ± 1930.
ANRI: KIT 485/64
61. Kapal pengeruk Buton dari Sawah Lunto dengan muatan aspal dan batu kapur ke Pasarwajo, Sulawesi Tenggara, ± 1930.
ANRI: KIT 485/2
62. Tumpukan bahan dasar aspal alam di Buton, Sulawesi Tenggara, ± 1930.
ANRI: Kempen 65-10159
63. Pekerja aspal dari Pasar Wajo mengisikan aspal ke gerbong kereta, Sulawesi Tenggara, ± 1930.
ANRI: KIT 485/76

64. Pemandangan alam di sekitar Pertambangan aspal Buton, 1965.
ANRI: Kempen 65-10157
65. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro melakukan kunjungan ke Pertambangan aspal di Pasar Wadjo (Bau-bau), 26 Maret 1953.
ANRI: Djapen M 8231
66. Pemandangan alam pada lokasi proyek aspal Buton, dengan latar belakang laut dan pegunungan, 1965.
ANRI: Kempen 65-10098
67. Kunjungan Menteri Bina Marga Brigjen Hartawan Ke Sulawesi untuk meninjau Tambang aspal (alam) di Buton, ± 1930.
ANRI: Kempen 65-10138

SOSIAL

68. Profil penduduk asli Mengkoko di wilayah Kolaka, pada masa sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, Sulawesi Tenggara, ± 1930.
ANRI: KIT 451/76
69. Profil penduduk asli Lanhoeli di wilayah Muna, ± 1930.
ANRI: KIT 451/82
70. Rumah penduduk Blimi di wilayah Wariti, Buton, ± 1930.
ANRI: KIT 485/54
71. Rumah penduduk Mengkala di wilayah Kolaka, ± 1930.
ANRI: KIT 535/59
72. Kuburan Kayu di Kombeli, Buton, ± 1930.
ANRI: KIT 814/86

73. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro melakukan kunjungan ke desa percobaan di Sulawesi Tenggara dalam rangkaian acara Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, 25 Maret 1953.
ANRI: Djapen M 8227
74. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro melakukan kunjungan ke Pulau Watji dan berdialog dengan wakil-wakil masyarakat dalam rangkaian acara Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, 25 Maret 1953.
ANRI: Djapen M 8234
75. Surat kepada Kepada Presiden Sukarno tentang surat keputusan pedoman Korban Massa Sulawesi Selatan Tenggara, 17 Mei 1957.
ANRI: Kabinet Presiden 818
76. Kontingan Daerah Tingkat II Muna sedang berpawai pada acara Pembukaan Pekan Olah Raga Daerah ke III se-Sulawesi Selatan Tenggara di Pare-pare, 29 Oktober 1960.
ANRI: Djapen M 16030
77. Surat Direktur Jenderal Urusan Bencana Alam dan Dana Sosial Departemen Sosial RI tentang data penyantunan korban bencana alam di daerah Sulawesi Tenggara, 30 Oktober 1974.
ANRI: Sri Sultan Hamengkubuwono 658
78. Laporan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Assisten Wakil Presiden RI tentang permasalahan pemotongan gaji guru SD di daerah Sulawesi Tenggara, 3 Mei 1986.
ANRI: Setwapres Umar Wirahadikusumah 730

79. Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara No. 63/AKLU/IX/1986 tentang penunjukkan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) buah wisma di Panti Penampungan Anak (PPA) Kendari, 12 September 1986.
ANRI: Setwapres Umar Wirahadikusumah 509

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

80. Reruntuhan Benteng Bastion dari Keraton Balijol Buton yang dibuat tahun 1631 pada masa pemerintahan VOC (*Vereniging Oostindische Compagnie*), ± 1930.
ANRI: KIT 338/82 dan KIT 338/84
81. Perahu "Radjah's" di perairan Pantai Kendari, ± 1930.
ANRI: NIGIS 50 – 78
82. Perahu Tradisional di perairan Pantai Kendari, ± 1930.
ANRI: NIGIS 50 – 79
83. Jembatan dari pohon kelapa sebagai alat penyeberangan penduduk dari Ogena ke Wariti, Buton, Sulawesi Tenggara, ± 1930.
ANRI: KIT 485/56
84. Pemandangan pantai Binangka di Buton, ± 1930.
ANRI: KIT 946/9
85. Sultan Buton, La Ode Falihi (ke tiga dari kiri dengan mahkota kerajaan) dengan Raja Goa, Andi Idjo Karaeng Lalolang dan Raja Bone; Aroempone Andi Panbenteng sebagai pimpinan adat terpenting pada upacara pelantikan Hadat Tinggi Sulawesi Selatan di Makasar, 12 November 1948.
ANRI: RVD 81112 RR 4

86. Pelantikan Hadat Tinggi di Makasar. Anggota Hadat Tinggi: Paeng Makale Andi Lolo, Aroe Maloesetasi dari Pare-pare, Raja Goa Andi Idjo Karaeng Lalolang, Arempone Andi Pabenteng Dg.Palawa (dibelakang) Sapati Lai Woei Rongga, Aroe (dibelakang) Pabicara Banggae (Majene) Kanbo Karaeng Gantarang (Boeloekoemba) Abd. Gani (dibelakang) Soelaewatan Sawito (Pinrang) Andi Tjalo, Opoe Patoeroe (Loewoe) Andi Ibrahim, Aroe Malolo Binoeang La Maga, 12 Nopember 1948,
ANRI: RVD M 2522
87. Maket rumah adat di daerah Buton, 1957.
ANRI: Kempen 571006 RR3-11
88. Permainan alat musik bambu oleh anak sekolah pada penyambutan Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sartono di Kendari, 19 Juni 1959.
ANRI: Kempen 590619 RR 10 dan RR 11
89. Tempat pembuatan perahu di Buton, Sulawesi Tenggara, tampak para pengrajin sedang memperagakan cara membuat perahu, 8 Agustus 1961.
ANRI: Japen M. 18272
90. Pelepasan perahu dari hasil kerajinan rakyat di Sulawesi Tenggara, 8 Agustus 1961.
ANRI: Japen M 16283
91. Dua orang sedang memperagakan tarian adat dalam penyambutan Menteri Bina Marga, Brigjen Hartawan ke Buton, Sulawesi Tenggara, 1965.
ANRI: Kempen 65-10057
92. Tari-tarian adat Buton oleh para wanita saat penyambutan Menteri Bina Marga, Brigjen Hartawan ke Buton, Sulawesi Tenggara, 1965.
ANRI: Kempen 65-10078

93. Tarian Kipas adat Buton dalam penyambutan Menteri Bina Marga, Brigjen Hartawan ke Buton, Sulawesi Tenggara, 1965.
ANRI: Kempen 65-10081

KEAGAMAAN

94. Altar sembahyang penganut Konghucu di Kelenteng, Kendari, Sulawesi Tenggara, ± 1930.
ANRI: KIT 792/81 dan KIT 792/83
95. Rumah missi penyebar agama Kristen "Langgoer" yang juga dijadikan sebagai tempat ibadat agama Kristen di Kendari, ± 1930.
ANRI: KIT 810/46
96. Gereja Roma Katholik "Langgoer", Kendari, ± 1930.
ANRI: KIT 810/44
97. Konferensi Alim Ulama se Sulawesi hadir pula utusan alim ulama dari Sulawesi Tenggara, 12 Mei 1960.
ANRI: Djapen Prosul No. M 15884

Penutup

[Type text]

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Sulawesi Tenggara dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.